



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Sudarmono Alias Mono;  
Tempat lahir : Soasangaji;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /20 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan,  
Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/III/2023/Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono ditahan dalam tahanan Kepolisian Daerah Maluku Utara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/21/III/2023/Ditreskrimum tanggal 31 Maret 2023 dan ditahan sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-08/Q.2.4/Eku.1/04/2023 tanggal 12 April 2023 dan ditahan sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;

Terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-193/Q.2.13.3/Eku.2/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan ditahan sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor: 66/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 08 Juni 2023 dan

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;

3. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Nomor: 78/Pen.Pid/2023/PN Lbh tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan sejak tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., Fitria La Mami, S.H. Advokat pada kantor advokat Darman Sugianto, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3/ADV-DS/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha dengan nomor register 85/SK/2023/PN Lbh tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 15 Juni 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 13 Juli 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 31 Juli 2023 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian“ yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
- 2 lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;
- 2 lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
- 1 rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
- 2 lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengken dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Tetap dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam berkas perkara terpisah yaitu perkara atas nama terdakwa Wa Ode Yusna Kaimudin;

5. Membebani terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono untuk membayar biaya perkara Rp. 2.500-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perkara a *quo* bukan merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) karena berhubungan dengan perbuatan administrasi pemerintahan serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan surat asli yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah milik saksi Wa Ode Yusna Kaimudian di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Halmahera Selatan, baik secara sendiri - sendiri atau bersama-sama dengan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dan saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat (Pj) Kepala Desa Soasangaji (terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode memiliki sebidang tanah yang dibeli dari almarhum Reni Mesie yang bertempat di Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat sesuai Surat Jual Beli Tanah tertanggal 08 Oktober 1986, dengan harga Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Bagian Utara dari Barat ke Timur dengan panjang 63 Depa (Hasta). Berbatasan dengan kebunnya Alm. Hengky Masie, sekarang sudah dibeli oleh Sdr La Ode Muliadi.
- Bagian Selatan dari Barat Ke Timur dengan panjang 60 Depa (hasta) Berbatasan dengan Kebunnya Alm La Ode Ratno, sekarang dijaga oleh La Asli Habat Tarima.

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Barat dari Utara Ke Selatan dengan Lebar 25 depa (hasta) Berbatasan dengan kebunnya Alm Renie Mesie, sekarang sudah dijual kepada Sdr La Ode Bolo;
- Bagian Timur dari Utara Ke Selatan dengan lebar 45 depa (hasta); Berbatasan dengan kebunnya Sdr La Taro;

Bahwa pada tahun 1990, saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode kembali pulang ke Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditahun 2014 saksi korban kembali ke Desa Soasangaji, dan sebagian lahan kebun milik saksi korban telah dikuasai dan ditanami tanaman oleh saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, kemudian saksi korban saat itu melaporkan hal tersebut kepada Pemerintah Desa Soasangaji;

Bahwa pada tanggal 05 September 2015, dilakukan Rapat Penyelesaian Sengketa (mediasi) antara saksi korban dengan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu oleh Pemerintah Desa Soasangaji, dengan pemimpin rapat Sekretaris Desa Soasangaji saksi SURIANA ODE PIKA dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD, dan Pemuda, dengan kesimpulan sesuai Notulen Rapat tanggal 05 September 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa saksi SURIANA ODE PIKA, sebagai berikut :

- Point.4 menyatakan "mulai hari ini Saudara Ladaharu tidak memiliki lagi lahan tersebut dan diserahkan sepenuhnya di miliki oleh La Ode Haji ;
- Point.5 menyatakan "dan mengenai buah cengkih akan dibagi 2 antara Ladaharu dan La Haji Haru dan hasil tersebut akan terkumpul di Sekretaris, husus tahun ini.

Akan tetapi setelah adanya hasil rapat tersebut, saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tetap bersikukuh tidak mau mengembalikan lahan kebun atau tanah tersebut kepada saksi korban, dan setiap kali saksi korban pergi ke kebun tersebut saksi korban sering dihalangi bahkan sampai diancam dengan menggunakan Parang oleh saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, sehingga dengan adanya tindakan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tersebut, saksi korban kembali melaporkan hal ini kepada pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat ditahun 2016;

Bahwa atas laporan saksi korban tersebut kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas selaku Kasi Pemerintahan melakukan mediasi ditingkat Kecamatan antara saksi korban dengan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, masing-masing bukti yang di hadirkan dari para pihak adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Pelapor LA ODE HAJI HARU menghadirkan bukti berupa dokumen surat jual beli tertanggal 08 Oktober tahun 1986 serta Notulen Rapat dari desa Soasangaji tertanggal 5 September 2015.
- Pihak terlapor La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak menghadirkan bukti apa-apa hanya berdasarkan saksi La Daharu mengatakan atas suruhan dari sdr. LA TARO (pemilik kebun) untuk menanam cengkeh.

Sehingga saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat Berita Acara Rapat untuk pengembalian Lahan kepada Pemiliknya saksi korban La Ode Haji Haru, namun saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak mau menyerahkan lahan kebun atau tanah milik saksi korban .

Bahwa selanjutnya saksi korban La Ode Haji Haru (Pelapor) melaporkan Kembali saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu (terlapor) di Pemerintah Desa Soasangaji, kemudian pada tanggal 10 April 2021 dilakukan mediasi kembali antara saksi korban dengan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, dan hasil mediasi dituangkan dalam Berita Acara Keputusan No. 235/DS-S/140/VI/2021, tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji La Jati HJ ARSAD, yang isinya sebagai berikut :

Keterangan Pelapor .

Bahwa menurut Saudara Pelapor lahan perkebunan telah lama dibeli dari saudara Reni Masie (Alm) sebagai pemilik lahan yang sebenarnya tepatnya pada tanggal 8 Oktober 1986 serta Saudara Pelapor selaku pembeli, Saudara Reni Maise (Alm) selaku penjual serta para saksi Saudara La Hase (Alm), Saudara Hengki Masie (Alm), Saudara La Medi dan Kepala Dusun Soasangaji atas nama Kepala Desa Jikohay Saudara La Ode Sehe (Alm) secara sah dan meyakinkan.

Keterangan Terlapor .

Bahwa menurut keterangan terlapor lahan perkebunan bukan miliknya secara sah tetapi dia diperintah oleh Saudara La Taro untuk menanam pohon cengkih di lahan perkebunannya Saudara La Taro nanti setelah itu hasilnya dibagi dua, tetapi Saudara terlapor salah tempat karena disaat Saudara terlapor menanam pohon cengkeh Saudara La Taro tidak menunjukan lahan perkebunannya secara benar karena disaat itu Saudara La taro tidak berada di Soasangaji dan Saudara La taro bukan penduduk Soasangaji namun Saudara La taro bertempat tinggal di Buton. Saudara terlapor menanam cengkih berdasarkan

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petunjuk dari Bapak La Ode Maputi (ayah dari isterinya terlapor) dan Saudara terlapor tidak memiliki surat kepemilikan lahan perkebunan tersebut atas nama La Taro sebagaimana Saudara terlapor sampaikan .

Dari hasil keterangan saudara pelapor dan terlapor diatas maka kami Pemerintah Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat Kabuapten Halmahera Selatan dapat menyimpulkan dan memutuskan bahwa lahan perkebunan yang disengketakan adalah benar-benar milik Saudara Pelapor .

Bahwa pada bulan September 2021, dilakukan mediasi lagi, karena saksi korban melaporkan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu di pihak Pemerintah Kecamatan Obi Barat yang dipimpin oleh Camat Obi Barat saksi Jakarudin, S.Pd. M.Pd dengan hasil mediasi berdasarkan Surat Keputusan Penghentian Nomor : 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang intinya mengakui kepemilikan lokasi sengketa kebun milik saksi korban dan melarang dan mengehtnikan kegiatan penambangan illegal yang dilakukan oleh terlapor La Ode Baharudin Ode Madjid, dkk .

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2021, saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas, dalam Kapasitas sebagai Kepala Kecamatan Obo Barat turun ke lokasi tanah/ lahan di Soasangaji dan melihat di lokasi lahan bersengketa, tertulis: "tanah ini hak milik La Ode Sudarmono sejak tanggal 30 Mei 2016, hubungi saksi gugat saya", dan saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas mencabutnya, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2021 saksi Nassarudin HI Ismail Alias Nas di didatangi oleh saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu bersama terdakwa La Ode Sudarmono dan mereka mengamuk atau rebut di Kantor Camat Obi Barat sambil menunjukan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016 dan satu lembar kwitansi pembelian lahan atas nama La Ode Sudarmono dengan harga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dibuat dan dikonsep secara sengaja oleh terdakwa La Ode Sudarmono, yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dan saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu secara sengaja meminta tolong terdakwa La Ode Sudarmono ke Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Soasangaji karena saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tidak tahu mengurus surat-surat tersebut karena tidak bersekolah sehingga semuanya dipercayakan kepada terdakwa La Ode Sudarmono untuk mengurusnya;

- Bahwa Terdakwa La Ode Sudarmono secara sengaja dan dikehendaki bersedia membantu saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu dengan meminta data diri saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu berupa KTP dan kartu Keluarga;
- Terdakwa La Ode Sudarmono meminta ukuran tanah atau denah gambar tanah dari saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu ;
- Setelah mendapat denah atau gambar dari saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu lalu, kemudian terdakwa La Ode Sudarmono turun mengroscek denah tersebut sesuai dengan ukuran tapal batas dan cocok dengan ukuran yang diserahkan kepada terdakwa La Ode Sudarmono selanjutnya terdakwa La Ode Sudarmono memproses SKT dimaksud dan sesuai kebiasaan yang terjadi syaratnya:

- 1) Sebelum saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Pjs Desa Soasangaji mengeluarkan surat tersebut, aparat Desa Soasangaji harus melakukan pemetaan lokasi kebun/lahan warga yang akan dibuatkan surat keterangan kepemilikan lahan;
- 2) Harus melakukan pengukuran lahan /kebun atas permintaan Pemohon terhadap tanah yang berlokasi dalam wilayah Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;
- 3) Harus melakukan pematokan batas kebun/lahan serta memastikan perbatasan –perbatasan lahan /kebun tersebut dengan warga lain.

Ketiga syarat diatas, secara sengaja dan dikehendaki tidak dilakukan oleh saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa bersama aparat Desa Soasangaji, hanya dilakukan oleh saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu saja.

- Kemudian data-data tersebut dibawa oleh terdakwa La Ode Sudarmono ke Bacan tepatnya di rumah kakak terdakwa yaitu saksi Wa Ode Yusna Kaimudin yang beralamat di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan di sana, terdakwa La Ode Sudarmono mengkonsep isi surat tersebut di kertas, lalu kemudian surat tersebut dibuat di Laptop milik Desa Soasangaji dan setelah selesai dibuat surat tersebut langsung diprint, kemudian diberikan kepada saksi Wa Ode Yusna Kaimudin untuk diberikan nomor dan tanggal surat dimaksud selanjutnya saksi Wa Ode

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji yang pertama kali menandatangani suratnya diikuti oleh terdakwa La Ode Sudarmono, sedangkan saksi La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode dan saksi La Ode Maputi menitipkan KTPnya di terdakwa La Ode Sudarmono, setelah itu 1 (satu) minggu kemudian, SKT dibawah oleh terdakwa La Ode Sudarmono di Desa Soasangaji dan ditandatangani oleh saksi La Ode Baharudin Ode Majid Alias Ode dan saksi La Ode Maputi, selanjutnya terdakwa La Ode Sudarmono menyerahkan SKT tersebut kepada saksi La Ode Baharudin Ode madjid Alias La Daharu.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei yang ditandatangani oleh saksi-saksi La Ode Tinaputi, La Ode Badaruddin dan La Ode Sudarmono dan Kepala Desa Saosangaji Wa Ode Yusna Kaimaudin.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu yang dicap dan ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa Soasangaji Wa Ode Yusna Kaimudin, dengan disaksikan oleh La Ode Maputi, La Ode Badaruddin, isinya telah membenarkan La Ode Baharudin Ode Madjid adalah benar-benar penduduk Desa Saosangaji yang memiliki sebidang Tanah dan kebun cengkeh 130 Pohon sejak dirabas hutan (dilitbang) tanggal 02 Maret 1992, berdasarkan tapal batas :

- Sebelah Utara berbatasan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Selatan berbatsan Kebun La Ode Bolo
- Sebelah Timur berbastan Kebun La Ode Muli
- Sebelah Barat Berbatsan Kebun La Jiharu

Demikianlah surat keterangan ini agar yang bersangkutan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH, yang dibuat dan dikonsep oleh terdakwa La Ode Sudarmono kemudian di cap dan ditandatangani oleh saksi Wa Ode Yusna Kaimudin selaku Penjabat Kepala Desa Soasangaji, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, adalah surat palsu atau surat yang isinya menerangkan bukan semestinya (keadaan

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



yang tidak benar) karena pemilik tanah atau lahan tersebut adalah saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode, dan surat tersebut dapat menimbulkan hak kepemilikan bagi saksi La Ode Baharudin Ode Majid Alias La Daharu .

Bahwa penomoran Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak sesuai dengan penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Halmahera Selatan yang mengacu kepada PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 135 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai Lampiran-Lampirannya, sehingga semestinya Nomor Surat yang benar adalah Nomor : 393.2/140/02/ Desa Soasangaji, dengan perincian :

- Kodifikasi Surat Nomor : 593 Tentang Pengurusan Hak-Hak Tanah
- Kodifikasi Surat Nomor : 2 Tentang Hak Milik ;
- Kodifikasi Surat Nomor : 140 Tentang Pemerintahan Desa ;
- Nomor Urut Surat berdasarkan Nomor Agenda Dari Desa ;
- Nama Desa

Bukan surat yang bernomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dan nomor surat tersebut tidak ada pada nomor agenda surat dari Desa Soasangaji, serta surat tersebut dibuat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal usul surat itu yang tidak benar .

Bahwa maksud dibuatnya Surat Palsu berupa SKT dengan kop Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang tanah dan lahan kebun cengkih atas nama La Ode Baharudin Alias La Daharu, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, telah menerangkan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan sehingga dengan surat palsu tersebut diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal yaitu :

- agar saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu bersama terdakwa La Ode Sudarmono untuk memasukan gugatan ke Pengadilan terkait sengketa tanah antara saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu dengan saksi korban
- untuk membuktikan bahwa tanah atau lahan itu adalah milik dari saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu agar ia tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut dan mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut.

Bahwa dari pemakaian Surat Keterangan Tanah (SKT) Kop SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENGKEH, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, atas nama La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu, dilampiri dengan surat BERKALA I SKT SURAT KETERANGAN, Nomor : 593.3/02/2016, tanggal 26 Mei 2016, surat tersebut dapat digunakan sebagai alas hak atau jenis surat bukti perolehan penguasaan tanah untuk dapat menimbulkan hak bagi saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu, karena saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu tetap ingin memiliki, menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan masih mengambil hasil tambang mas yang berada di dalam tanah tersebut akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi saksi korban La Ode Haji Haru Alias Ode karena ia tidak dapat memiliki dan menguasai tanah atau lahan miliknya sendiri, kerugian mana dapat dirincikan sebagai berikut :

- Harga jual tanah dengan potensi tambang emas di dalamnya seharga Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Buah Cengkih yang telah dipanen saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu sekitar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Hasil penambangan emas yang diambil oleh saksi La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu sekitar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi korban sekitar Rp.5.100.000.000,00 (lima milyar serratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut .

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh tanggal 13 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. La Ode Haji Haru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah);
- Bahwa kejadian penyerobotan terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi Korban sudah lupa pada tahun 2020 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Korban sudah lupa luas keseluruhannya secara pasti namun sebelah utara panjang 63 depa (hasta), sebelah selatan panjang 60 depa (hasta), sebelah barat dengan lebar 25 depa (hasta) dan sebelah timur dengan lebar 45 depa (hasta);
- Bahwa cara mengukur ukuran depa (hasta) menggunakan tangan Saksi Korban;
- Bahwa awalnya tanah tersebut Saksi Korban beli dari saudara Reny Mesie pada tanggal 8 Oktober 1986 dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 2 tahun kemudian Saksi Korban menanam cengkeh lalu kembali ke Buton karena ibu Saksi Korban sakit dan Saksi Korban baru kembali ke Desa Soasangaji sekitar tahun 2014;
- Bahwa saat kembali ke desa lalu Saksi Korban mengecek tanah yang Saksi Korban beli tetapi sesampainya di sana Saksi Korban dicegat oleh Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) karena menurutnya tanah tersebut milik Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi Korban sudah menjelaskan tanah tersebut adalah milik Saksi Korban tapi Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) bersikukuh tanah tersebut milik Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi Korban kemudian melaporkan permasalahan tanah tersebut ke pemerintah Desa Soasangaji sekitar tahun 2015 atau 2016 dan tidak lama kemudian Saksi Korban dan Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) di panggil untuk mediasi;

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tidak hadir untuk melakukan mediasi di kantor desa tersebut;
- Bahwa hasil mediasi yang difasilitasi Pemerintah Desa Soasangaji adalah tanah tersebut milik Saksi Korban berdasarkan surat jual beli namun Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tidak menerima dan mengancam Saksi Korban menggunakan parang;
- Bahwa terhadap hasil mediasi tersebut Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) mengancam Saksi Korban dengan mengatakan Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tunggu Saksi di kebun;
- Bahwa Saksi Korban lalu melaporkan ke pemerintah Kecamatan Obi Barat dan dilakukan mediasi dengan hasil tanah tersebut milik Saksi Korban tapi Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tetap tidak menerima untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Korban kembali ke tanah tersebut dan mendapati Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) sedang menggali lubang yang diduga memiliki kandungan emas di dalamnya;
- Bahwa karena terus bertikai dengan Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah), Saksi Korban kembali melaporkan ke Pemerintah Desa Soasangaji sekitar tahun 2021 dan saat itu dilakukan mediasi dengan hasil tanah tersebut milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tetap kembali bersikukuh tanah tersebut milik Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) dan tidak menyerahkan kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut di Kantor Kepolisian Daerah Maluku Utara;
- Bahwa tanah yang Saksi Korban beli diketahui dan tercatat di Pemerintah Desa Soasangaji yang saat itu kepala desanya adalah Saudara La Ode Sehe;
- Bahwa saat terjadi jual beli tanah dari saudara Reny Mesie yang menjadi saksi adalah Saksi La Medi;
- Bahwa saat Saksi Korban beberapa kali mengecek tanah, tanaman cengkeh yang awalnya Saksi Korban tanam setelah dibeli sudah dipangkas;

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian penyerobotan tanah Saksi Korban mengalami banyak kerugian di antaranya biaya akomodasi dalam pengurusan tanah dan hasil dari tanah tersebut yang tidak pernah Saksi Korban nikmati apabila dinominalkan sekitar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut sekarang di tutup oleh Babinsa;
- Bahwa Saksi Korban mengenal saudara La Taro karena tanah yang Saksi Korban beli dari saudara Reni Mesie berbatasan langsung dengan tanah milik saudara La Taro;
- Bahwa tanah yang Saksi Korban beli memiliki patok tapi Saksi Korban sudah lupa letaknya;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tidak pernah menunjukkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tidak pernah ijin kepada Saksi Korban saat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu sejak kapan Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan mediasi Saksi Korban pernah menyampaikan akan membagi dua tanah tersebut tapi Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tidak mau;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) di kantor polisi karena Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) terus menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin Alias La Daharu (terdakwa terpisah) tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban awalnya menanam cengkeh sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) pohon dan sekarang tersisa 4 (empat) pohon;
- Bahwa Saksi Korban tidak tahu siapa yang memotong cengkeh tersebut;
- Bahwa di tanah tersebut hanya ada tanaman cengkeh dan saat Saksi Korban kembali mengecek ada beberapa pohon cengkeh yang baru ditanam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sebagian salah yaitu:

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas alam terdapat kali mati bukan tanaman cengkeh;
- Penghitungan total kerugian jika dinominalkan tidak ada mencapai Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

## 2. La Medi Rumbia Alias La Medi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban La Ode Haji Haru dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru dari saudara Reni Mesie sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu tentang jual beli tanah tersebut karena dipanggil sebagai saksi untuk menandatangani surat jual beli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga tanah yang dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi tanah sekarang dan siapa yang menguasai karena tidak pernah Saksi lewati;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat tanah tersebut saat menandatangani surat jual beli;
- Bahwa saat terjadi jual beli tanah tidak ada sertifikat maupun surat tanah yang diberikan saudara Reni Mesie;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru kemudian diolah dengan menanam tanaman cengkeh;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru menanam cengkeh sejak tahun 1986 setelah itu Saksi La Ode Haji Haru berangkat ke Buton dan kembali ke Desa Soasangaji pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru sejak Saksi Korban La Ode Haji Haru pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya orang lain melakukan aktivitas di tanah tersebut setelah Saksi Korban La Ode Haji Haru pergi;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Saksi Korban La Ode Haji Haru menanam cengkeh di tanah tersebut melainkan hanya diceritakan oleh orang lain;

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa Saksi sering dijadikan Saksi saat ada jual beli tanah di Desa Soasangaji;
- Bahwa dulunya kepala desa saat terjadi jual beli tanah tersebut adalah saudara Muslim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu pada keterangan jika tanah tersebut adalah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;

**3. La Asli Alias La Asli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi La Ode Haji Haru dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa kejadian penyerobotan tanah tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi La Ode Haji Haru dari saudara Reni Mesie sejak tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanahnya secara pasti melainkan sebelah selatan dengan ukuran 60 depa (hasta), sebelah utara dengan ukuran 63 depa (hasta), sebelah barat dengan ukuran 25 depa (hasta), sebelah timur dengan ukuran 45 depa (hasta);
- Bahwa tanah tersebut bagian selatannya berbatasan dengan tanah milik Saksi yang Saksi ketahui dari surat jual beli;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah milik Saksi dengan cara hibah dari saudara La Ratno pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi melihat surat jual beli tanah tersebut pada tahun 2021 dimana Saksi saat itu dipanggil sebagai saksi tapal batas yang ditunjukan Saksi Korban La Ode Haji Haru di rumah Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa kepala desa yang menjabat saat terjadi jual beli tanah pada saat itu adalah saudara Muslim;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa aturan pengukuran memakai depa (hasta) diukur menggunakan tangan pembeli dan ketentuan tersebut diakui secara umum;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru tinggal di Desa Soasangaji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering dijadikan sebagai saksi saat ada jual beli tanah di Desa Soasangaji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu pada keterangan Saksi jika tanah tersebut adalah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;

#### 4. **La Ode Bolo Alias La Jaku**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban La Ode Haji Haru dan yang melakukan penyerobotan tanah adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi tidak tahu bertempat di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan dari mana Saksi Korban La Ode Haji Haru mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru yaitu terletak bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang dibeli dari saudara Hengky Mesie;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi jarang melewati tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2004 belum ada tanaman cengkeh yang ditanam di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban La Ode Haji Haru menanam cengkeh melainkan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang menanam cengkeh;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah, Saksi tidak melihat ada aktivitas di tanah yang menjadi sengketa namun pada tahun 2005 atau 2006 Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) melakukan pembersihan di tanah tersebut;
- Bahwa saat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) sedang melakukan pembersihan tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dari mana mendapatkan

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) menjawab tanah tersebut adalah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang dibeli dari saudara La Taro seluas 4 (empat) hektar;

- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru pernah mengelola emas di tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru dimana sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa setahu Saksi di sekitar tanah sengketa tersebut ada kali mati tapi tidak berbatasan langsung;
- Bahwa tanah yang dibuat galian berada di tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi terakhir ke tanah kebun Saksi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak Saksi terakhir kali ke tanah kebun, Saksi melihat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) di tanah sengketa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu pada keterangan tidak ada batas alam di sekitar tanag dan batas utara serta Selatan yang Saksi tidak tahu;

**5. La Ode Maputi Alias La Ode Maputi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang Saksi sudah lupa di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mendapatkan tanah sengketa tersebut dari saudara La Taro pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah), namun batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara Reni, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi La Ode Bolo, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik saudara La Ode Ratno dan sebelah timur berbatasan dengan kali mati;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tersebut tapi tidak tahu isinya karena Saksi tidak bisa baca tulis;





- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu keterangan Saksi jika tidak pernah tandatangan pada surat keterangan tanah;

**6. La Jati Hi Arsad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah atau pemalsuan surat;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa pada tahun 2020 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Soasangaji yang menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru membeli tanah tersebut pada tahun 1986;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tidak memiliki tanah di sekitar tanah sengketa, melainkan hanya tanah milik saudara La Taro yang digarap oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa tanah milik saudara La Taro letaknya di sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai kepala desa pernah memfasilitasi untuk mediasi sekitar tahun 2021 karena ada laporan dari Saksi Korban La Ode Haji Haru karena tanah miliknya yang menjadi sengketa dikuasai oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa hasil dari mediasi yang dilakukan lalu dinyatakan tanah tersebut milik Saksi Korban La Ode Haji Haru berdasarkan surat jual beli yang ditanda tangani oleh kepala dusun saudara La Ode Sehe dengan luas dan batas-batas yang Saksi sudah lupa;
- Bahwa Terdakwa merasa memiliki tanah sengketa tersebut dan saat mediasi dilakukan Terdakwa mengatakan tanah tersebut milik saudara La Taro yang dikelola oleh Terdakwa dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mengelola tanah milik Saudara La Taro sejak tahun 1992;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada masalah sengketa tanah Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban La Ode Haji Haru menanam cengkeh di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) pernah menggarap atau menanam cengkeh di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru sejak membeli tanah tersebut kemudian berdomisili di Desa Soasangaji tapi beberapa waktu pernah ke Buton;
- Bahwa setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Desa sudah ada penomoran surat di Desa Soasangaji namun Saksi tidak tahu dasar hukumnya;
- Bahwa belum ada register surat masuk dan surat keluar di kantor desa;
- Bahwa sejak Saksi menjabat kepala desa yang membuat surat keterangan tanah desa adalah sekretaris desa sedangkan Saksi hanya menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap surat keterangan tanah desa diketahui oleh camat atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu tanah sengketa tersebut bukan milik Saksi Korban La Ode Haji Haru melainkan milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);

**7. Nasaruddin Hi. Ismail Alias Nas**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa pada tahun 2020 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) dan yang menjadi korbannya Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Camat Kecamatan Obi Barat;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru membeli tanah tersebut pada tahun 1986;

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu terkait jual beli tersebut karena pada tanggal 30 Juni 2016 saudara dari Saksi Korban La Ode Haji Haru melaporkan jika Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) menguasai tanah tersebut dimana saat itu Saksi menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Obi Barat;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru mempunyai surat jual beli tanah tersebut dan ditunjukkan saat mediasi di kantor camat;
- Bahwa saat mediasi dihadiri oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru dan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) lalu dimuat dalam notulensi rapat dan menandatangani berita acara kesepakatan;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) membaca berita acara kesepakatan tersebut sebelum ditanda tangani;
- Bahwa yang menandatangani berita acara mediasi adalah Saksi dengan mengatasnamakan camat;
- Bahwa sebelum dilakukan mediasi Saksi tahu letak lokasi tanah sengketa tersebut dan melihat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) menanam cengkeh;
- Bahwa tidak ada mediasi yang dilakukan pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi baru ke lokasi tanah sengketa pada tahun 2021 setelah adanya laporan mengenai papan nama tanah milik Terdakwa;
- Bahwa ada petugas yang ditugaskan untuk mengukur lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pengukuran tanah menggunakan sistem depa (hasta) dimana 1 (satu) depa besarannya 1,5 meter;
- Bahwa keterangan Saksi dalam keterangan berita acara pemeriksaan nomor urut 13 dan 14 mengenai surat kepemilikan tahun 2016 tidak sah karena di dalamnya tidak ditanda tangani saksi tapal batas tanah tersebut;
- Bahwa selama menjabat sebagai camat Saksi belum pernah menandatangani surat jual beli maupun kepemilikan tanah untuk diketahui sebagai camat;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat keterangan tanah, yang di dalamnya memuat saksi dari pihak tapal batas dan masyarakat setempat, ukuran tanah dan ditanda tangani oleh pihak di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1992 berada di Desa Soasangaji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu tanah sengketa tersebut bukan

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban namun milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan terkait nomor surat pada kantor desa;

**8. Jakaruddin, S.Pd, M.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa pada tahun 2020 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan penyerobotan adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) dan yang menjadi korbannya Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Kantor Kecamatan Obi Barat dan sebelumnya menjabat sebagai Camat Kecamatan Obi Barat dari tahun 2016 sampai tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan dan dari mana Saksi Korban La Ode Haji Haru mendapatkan tanah yang menjadi sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi belum tahu mengenai ada tidaknya penomoran dan kode surat pada surat yang dikeluarkan oleh pihak kecamatan;
- Bahwa selama menjabat sebagai camat, Saksi belum pernah menandatangani surat jual beli maupun kepemilikan tanah untuk diketahui sebagai camat;
- Bahwa sempat dilakukan mediasi pada tahun 2021 karena ada penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) ikut menandatangani berita acara kesepakatan mediasi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan bukti kepemilikan tanah kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tapi Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tidak pernah menunjukkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait surat kepemilikan tanah tahun 2016;
- Bahwa ada petugas yang turun langsung mengecek lokasi tanah yang menjadi sengketa;

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petugas tersebut di antaranya Saksi, Saksi La Jati Hi. Arsad, pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Babinsa kemudian mengukur tanah tersebut menggunakan depa (hasta) dengan mengacu pada surat jual beli;
- Bahwa posisi tanah sengketa berdekatan dari utara ke timur;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran saat itu kondisi tanah terdapat sebuah galian dan pohon cengkeh;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan langsung Saksi mengeluarkan surat penghentian penggalian dengan disaksikan langsung oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa tugas sebagai camat di antaranya memfasilitasi mediasi warga jika ada masalah mengenai tanah;
- Bahwa terkait persuratan di kecamatan, kepala seksi harus berkoordinasi dengan camat namun dalam masalah tanah sengketa antara Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan Saksi Korban La Ode Haji Haru, Saksi tidak tahu dan hanya menandatangani saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu surat keterangan tanah yang ditandatangani adalah palsu dan nomor surat pada kantor desa;

**9. La Ode Muh Zainal Hasan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa kejadian penyerobotan tersebut terjadi pada hari, tanggal, bulan yang Saksi sudah lupa pada tahun 2020 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi belum pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara Sekretaris Desa Soasangaji pada tahun 2016;
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai pejabat sementara sekretaris yaitu Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji yang saat itu dijabat oleh Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) menggarap maupun menanam di tanah sengketa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya masalah sengketa tanah, Saksi tidak pernah melihat Saksi Korban La Ode Haji Haru menanam cengkeh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris selama 3 (tiga) bulan dari bulan Januari sampai Maret tahun 2016;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang melaporkan penyerobotan tanah ke Kantor Desa Soasangaji mengenai kepemilikan tanah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa surat yang dibuat saat menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris;
- Bahwa Saksi sudah lupa mengenai penomoran surat yang dikeluarkan oleh kantor desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak ikut serta mengenai surat yang dibuat oleh pejabat sementara kepala desa saat dulunya Saksi masih menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris;
- Bahwa di Desa Soasangaji pada tahun 2016 tidak memiliki perangkat komputer;
- Bahwa pada tahun 2016 setiap surat dibuat dengan tulisan tangan;
- Bahwa selama menjabat sebagai pejabat sementara sekretaris, Saksi belum pernah membuat surat maupun dokumen desa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu perangkat maupun fasilitas komputer dan printer di Kantor Desa Soasangaji pada saat itu sudah ada;

**10. Rusdi Hasan, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan sejak 15 Agustus 2022 dan masih sementara menjabat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Selatan di antaranya menyusun peraturan daerah, menganalisis peraturan daerah atau peraturan hukum lainnya serta mengevaluasi produk-produk hukum yang berlaku di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa pada bulan Januari tahun 2023 Saksi ditelepon penyidik dari Kepolisian Daerah

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara untuk memberikan keterangan dan selanjutnya pemeriksaan dilakukan di kantor Polsek Pulau Bacan;

- Bahwa Saksi diperiksa dan memberikan keterangan mengenai kode persuratan dan pengarsipan dokumen;
- Bahwa dasar hukum mengenai kode persuratan dikaitkan dengan surat keterangan tanah dari desa yaitu harus sesuai dengan prosedur penomoran dan pengarsipan yang diatur dalam Pemendagri Nomor 38 Tahun 2012 yang telah diubah menjadi Permendagri Nomor 135 Tahun 2017;
- Bahwa total jumlah desa di Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) desa;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan belum pernah melakukan sosialisasi di desa-desa mengenai kode persuratan dan pengarsipan;
- Bahwa kepala desa dan sekretaris desa harus mengetahui kode persuratan;
- Bahwa sanksi kesalahan penomoran surat yaitu dikenakan cacat administratif sebagai pemalsuan surat;
- Bahwa terdapat beberapa komponen kode pada surat keterangan tanah tapi Saksi tidak tahu;
- Bahwa kewenangan kepala desa dan pejabat sementara kepala desa pada dasarnya sama saja hanya tugas pejabat sementara kepala desa tidak berwenang dalam pengelolaan keuangan desa dan administrasi kepegawaian;
- Bahwa batasan kewenangan kepala desa dan pejabat sementara kepala desa diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa membuat surat keterangan tanah merupakan salah satu tugas pejabat sementara kepala desa;
- Bahwa surat keterangan hak milik sebidang tanah merupakan salah satu syarat untuk pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa prosedur pembuatan surat keterangan tanah dari desa harus disertai dengan riwayat tanah dan peralihan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa prosedur awalnya pemohon menyampaikan permohonan pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah ke kepala desa atau sekretaris desa lalu setelah diterbitkan surat keterangan kepemilikan

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut diberi indeks atau label untuk selanjutnya diarsipkan di kantor desa;

- Bahwa konsekuensi jika surat tersebut tidak diarsipkan di kantor desa maka di anggap surat tersebut palsu;
- Bahwa antara kode surat keterangan tanah dan kode surat keterangan hak pakai memiliki kode yang berbeda sehingga tidak bisa digunakan satu sama lainnya;
- Bahwa sesuai tata naskah pemerintah daerah setiap surat keluar harus ada arsip dan tembusannya ke pemerintah daerah;
- Bahwa komponen dalam surat keterangan kepemilikan tanah dari desa harus memuat tandatangan perangkat pemerintah desa, pemohon, saksi dari penjual dan pembeli;
- Bahwa kalau tidak ada salah satu dari komponen tersebut maka status peralihan tanah diragukan dan konsekuensinya cacat administrasi;
- Bahwa kode nomor untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah memiliki kode 593.3;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada sanksi hukumnya atau tidak mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 135 Tahun 2017;
- Bahwa tidak semua surat dari semua desa diarsipkan di bagian hukum Kabupaten Halmahera Selatan, melainkan hanya surat keterangan kepemilikan tanah dan ditembuskan juga di BPMD untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan;
- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai keterangan mengenai kode persuratan;
- Bahwa apabila terdapat kesalahan penulisan dalam surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan dari desa maka tidak dikoreksi oleh bagian hukum Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dari desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ditembuskan dan diarsipkan di bagian hukum atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**11. Wa Ode Yusna Kaimudin, S.Pd.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dimaksud adalah surat keterangan tanah dan Saksi yang membuat surat tersebut untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dibuat pada tanggal 26 Mei 2016 yang isinya tentang sebidang tanah berisi tanaman cengkeh yang terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa surat keterangan tanah Saksi buat di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan karena di Desa Soasangaji pada saat itu tidak ada listrik di kantor desa;
- Bahwa syarat pembuatan surat keterangan tanah harus ada surat permohonan dari pemohon, kartu tanda penduduk pemohon, skala/denah tanah yang telah diukur batas dan luasnya;
- Bahwa Saksi menjabat Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji selama beberapa bulan sejak April sampai November tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Selatan nomor 97 tahun 2016;
- Bahwa kewenangan Saksi di antaranya mengelola keuangan desa dan membantu warga dalam pembuatan surat keterangan tanah;
- Bahwa dalam surat keputusan tidak menuliskan kewenangan PJS Kepala Desa untuk mengelola keuangan/dana desa;
- Bahwa surat keterangan yang boleh dibuat oleh PJS Kepala Desa di antaranya adalah surat keterangan tanah dan bangunan, surat mendirikan bangunan seperti sekolah atau masjid, surat keterangan kematian, surat keterangan domisili;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi mengenai kewenangan sebagai PJS Kepala Desa yaitu Bupati Halmahera Selatan dan juga dasar hukumnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2012 tentang nomor surat;
- Bahwa mekanisme dari desa untuk mengeluarkan surat keterangan tanah yaitu dari pemerintah desa turun ke lokasi untuk mengecek tanah, harus tahu batas-batas tanah, luasnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek tanah yang diajukan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) untuk membuat surat keterangan tanah dan hanya menugaskan Terdakwa beserta salah satu petugas desa karena saat itu Saksi sedang berhalangan;

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan perangkat desa;
- Bahwa mekanisme pengukuran tanah tidak boleh orang lain di luar dari perangkat desa ikut mengukur tanah dan saat itu Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) bersama Terdakwa datang ke rumah lalu Saksi menyampaikan agar diberitahukan ke kepala urusan desa untuk ikut dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kaur desa juga ikut atau tidak saat pengukuran tanah;
- Bahwa tanah sengketa diukur pada bulan Mei tahun 2016 dan yang membuat skala/denah tanah mengenai panjang dan lebarnya yaitu Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah tanah diukur langsung diserahkan kepada Saksi dan keesokan harinya surat keterangan tanah sudah Saksi buat;
- Bahwa saat itu Saksi berada di Desa Gandasuli dan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) bersama Terdakwa membawa skala tanah yang berisi catatan ukuran panjang dan lebar serta batas-batasnya dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) karena Saksi tahu sejak masih kelas 5 sekolah dasar sekitar tahun 1993 atau 1994 melihat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) berkebun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung bukti yang menunjukkan tanah tersebut milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi pernah ke Desa Soasangaji tapi tidak memiliki rumah di Soasangaji melainkan rumah milik orang tua dan Saksi hanya mempunyai rumah di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa saat sebagai pejabat sementara kepala desa ke Desa Soasangaji pada bulan April Saksi hanya memperkenalkan diri sebagai pejabat sementara, yang kedua pada bulan Juli untuk cek lokasi mana saja yang akan dibuat kantor desa dan drainase, yang ketiga sebelum bulan November saat itu cek lokasi untuk membuat WC (water closet);
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan tanah di rumah Saksi di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan menggunakan laptop milik Saksi dan membubuhi cap desa yang Saksi bawa;
- Bahwa stempel desa ada pada Saksi karena Saksi yang membuatnya dan selalu Saksi simpan sendiri;

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen lain selain surat permohonan dan Kartu Tanda Penduduk yang diserahkan oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa susunan surat keterangan tanah diawali dengan kop surat keterangan tanah lalu di bawahnya nomor tanah dan isi mengenai batasan dan luas tanah;
- Bahwa tidak ada konsep sebelumnya terkait surat keterangan tanah melainkan Saksi yang mengetik sendiri dan menyusunnya;
- Bahwa tidak ada format baku dari desa mengenai surat keterangan tanah;
- Bahwa setelah selesai membuat surat tersebut langsung Saksi tandatangani dan juga ditandatangani oleh Terdakwa namun sebagian saksi lain belum ditandatangani;
- Bahwa surat tersebut lalu Terdakwa ke Desa Soasangaji keesokan harinya tapi Saksi tidak tahu kapan surat keterangan tanah tersebut selesai ditandatangani;
- Bahwa Saksi setelah itu tidak pernah ke Desa Soasangaji untuk menanyakan terkait surat keterangan;
- Bahwa surat yang Saksi buat penomorannya 593.3/02/2016 dimana Saksi membuat juga melihat dari contoh yang ada di peramban Google.
- Bahwa terdapat pedoman penomoran surat yaitu bukunya untuk penomoran surat 593.3 tentang hak pakai dan untuk nomor 593 mengenai pengurusan hak-hak atas tanah, untuk nomor 593.2 mengenai hak milik yang semuanya termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2012;
- Bahwa terkait surat yang diperuntukkan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah), Saksi keliru dalam pembuatan nomor suratnya yang seharusnya bukan surat keterangan kepemilikan tanah melainkan surat hak pakai;
- Bahwa selama menjabat pejabat sementara kepala desa Saksi hanya membuat dua surat keterangan di antaranya surat keterangan tanah yang diajukan oleh Terdakwa dan surat keterangan bangunan;
- Bahwa saat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) datang pada bulan April tahun 2016 tidak langsung dibuatkan surat keterangan tanah oleh Saksi karena saat itu Terdakwa datang dan tidak membawa kartu tanda penduduk maupun tidak ada catatan pengukurannya;

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah meminta maaf kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) karena tidak tahu rumah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara La Taro selama menjabat PJS Kepala Desa;
- Bahwa di Desa Soasangaji memiliki buku register surat masuk keluar;
- Bahwa di Desa Soasangaji tidak memiliki buku tanah;
- Bahwa saudara La Mudi, saudara La Bolo, Saksi Korban La Ode Haji Haru yang memiliki tanah berbatasan langsung dengan tanah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tidak ada tandatangan di surat yang Saksi buat karena orang-orang tersebut pendatang di Desa Soasangaji;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tidak pernah memberikan uang atau imbalan apa pun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mengenai betul atau tidaknya tanah tersebut karena setahu Saksi tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) di sebelah timur dan tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru di sebelah barat;
- Bahwa Saksi membuat denah pengukuran dengan menggunakan Microsoft Word;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan hak pakai dan hak kepemilikan;
- Bahwa maksud dibuatkan surat keterangan tanah untuk menerangkan tanah tersebut adalah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang di atasnya ada tanaman cengkeh;
- Bahwa dulunya di Desa Soangaji semua tanah pada awalnya bukan milik siapa-siapa, namun bisa menjadi milik jika tanah tersebut di garap, dikelola dan difungsikan;
- Bahwa saudara La Ode Badarudin ada di rumah Saksi saat sedang membuat surat keterangan tanah tapi belum sempat menandatangani surat tersebut karena saudara La Ode Badarudin sedang keluar;
- Bahwa setahu Saksi saudara La Ode Badarudin menandatangani surat tersebut di Desa Soasangaji yang saat itu dibawa oleh Terdakwa tapi tidak jelas kapan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak membawa buku agenda saat berada di Desa Gandasuli;
- Bahwa Saksi tahu nomor suratnya 02 karena Saksi meminta Terdakwa agar membawa buku agenda yang Saksi tinggalkan di Desa Soasangaji untuk dibawa ke Desa Gandasuli;

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsep surat keterangan tanah termuat dalam Permendagri;
- Bahwa surat keterangan tanah yang Saksi buat hanya satu rangkap yang asli sehingga arsipnya hanya foto kopian;
- Bahwa foto kopian surat keterangan tanah yang dijadikan arsip masih ada tersimpan di rumah Saksi karena saat itu belum ada kantor desa dan saat menjabat PJS Kepala Desa barulah kantor tersebut dibangun;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada perangkat desa lain sebelum Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mengajukan pembuatan surat keterangan tanah apakah ada orang lain yang mengklaim tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai pjs kepala desa terdapat beberapa kaur yang sudah lama menjabat maupun yang baru diangkat saat Saksi menjabat PJS Kepala Desa;
- Bahwa pejabat di kantor desa perangkatnya yaitu kaur pemerintahan, kaur umum, bendahara dan sekretaris;
- Bahwa saat meminta pengukuran tanah Saksi belum sempat memberitahukan ke perangkat desa lain dan hanya secara lisan menguasai kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal saudari Suryani Ode Pika yang pada tahun 2016 menjabat sebagai sekretaris desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan mengenai mediasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berita acara mediasi yang ditandatangani oleh saudari Suryani Ode Pika;
- Bahwa seandainya Saksi mengetahui ada berita hasil mediasi tahun 2015 Saksi tidak akan membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mencari fakta terlebih dahulu karena Saksi hanya 3 (tiga) kali berkunjung ke Desa Soasangaji dan tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hak pakai adalah hak untuk memakai sesuatu, sedangkan hak milik adalah hak untuk memiliki sesuatu;
- Bahwa yang harus membuat denah pengukuran tanah adalah kaur pemerintahan;

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ijin ke kaur pemerintahan saat membuat denah pengukuran tanah;
- Bahwa pada tahun 2016 Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada pengajuan surat peralihan hak saat pengajuan surat keterangan tanah;
- Bahwa awalnya Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) datang dan menyampaikan secara lisan tapi juga disertai dengan surat permohonan, dan surat permohonan tersebut Saksi simpan di rumah Saksi di Desa Gandasuli dan tidak diarsipkan di Kantor Desa Soasangaji;
- Bahwa orang tua Saksi juga cerita bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan setelah sengketa juga diceritakan tanah tersebut diperoleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dari pemberian saudara La Taro;
- Bahwa penomoran pada surat salah karena Saksi membuat surat tersebut dalam keadaan terburu-buru dan tidak mengecek karena sedang membuat nilai anak-anak di sekolah;
- Bahwa tanah asli milik Saksi Korban La Ode Haji Haru masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada saudara La Ode Maputi mengenai asal usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sejak awal Saksi tidak berniat memalsukan surat keterangan tanah;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke Desa Soasangaji pada bulan September tahun 2016;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**12. La Ode Baharudin Ode Madjid Alias La Daharu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penyerobotan tanah atau pemalsuan surat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang melakukan pemalsuan surat adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemalsuan tersebut terjadi pada hari yang Saksi sudah lupa tanggal 26 Mei 2016 di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Sosangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) di tahan karena melakukan pemalsuan Surat Keterangan Tanah yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa Saksi masih ingat bentuk surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali tandatangan di sebelah tanda tangan saksi;
- Bahwa surat tersebut dibuat untuk Saksi tujuannya agar Saksi mengetahui batas-batas serta luas tanah tersebut untuk diterbitkan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa awal mula lahan tanah tersebut Saksi miliki sejak tahun 1992 yang awalnya milik saudara La Taro yang diberikan kepada mertua Saksi pada tahun 1986 lalu pada tahun 1992 Saksi kelola tanah tersebut dengan membuka lahan dengan menanam padi, sayur-sayuran, kemudian tahun 1994 Saksi menanam cengkeh lalu saudara La Taro datang dan menanyakan mengapa tanah tersebut ditanami cengkeh dan siapa yang menyuruh menanam;
- Bahwa kemudian Saksi menjawab jika Saksi disuruh bapak mertua Saksi yaitu Saksi La Ode Maputi lalu saudara La Taro menyampaikan agar hasil tanaman cengkeh tersebut dibagi dua dengannya;
- Bahwa Saksi lalu menanyakan kembali ke saudara La Taro apakah tanah tersebut milik saudara La Taro dan dijawab jika tanah tersebut memang milik saudara La Taro;
- Bahwa Saksi lalu bertanya lagi dan meminta ditunjukkan batas-batasnya dan dijawab saudara La Taro tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah milik saudara La Mudi/Hengki, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik saudara La Bolo, sebelah timur dengan tanah milik saudara La Mudi, dan sebelah barat berbatasan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru, yang sebelah timur dibuat batasan dengan tanaman pohon cokelat yang ditanam oleh saudara La Mudi;

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Saksi tersebut panjangnya dari utara ke selatan dengan ukuran 110 meter, lebar dari utara 31 meter, dari timur ke barat 47 meter, dari barat lebarnya 110 meter;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang milik saudara La Taro yang Saksi kelola dengan hasil dari tanah tersebut di bagi dua;
- Bahwa permasalahan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru terjadi pada hari, tanggal yang Saksi sudah lupa pada akhir tahun 2014;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi sesudah surat keterangan tanah tersebut keluar;
- Bahwa pernah terjadi mediasi dan dibahas oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru yang mempersoalkan mengenai penyerobotan lahan kebun milik Saksi dan menunjukkan surat-suratnya;
- Bahwa pada tahun 2014 sekembalinya Saksi Korban La Ode Haji Haru dari Buton, kemudian pada tahun 2015 terjadi mediasi;
- Bahwa mediasi dilakukan langsung oleh kepala desa yang saat itu dijabat oleh saudara La Muslim;
- Bahwa saat mediasi Saksi mengatakan bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru menyampaikan bahwa tanah milik Saksi adalah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru, Saksi juga menyampaikan tidak mengetahui asal usul Saksi Korban La Ode Haji Haru dan hasil mediasi tidak ada karena tidak dihadiri oleh Saksi Korban Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah ada mediasi setelah tahun 2015;
- Bahwa yang melatarbelakangi Saksi ingin membuat surat keterangan tanah karena setelah mediasi Saksi Korban La Ode Haji Haru tetap menyatakan tanah tersebut adalah miliknya karena ada surat-suratnya, yang kemudian Saksi menyampaikan kenapa baru datang setelah 20 tahun lebih dan mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan supaya tidak diganggu oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru dan kepala dusun saat itu menyampaikan untuk tidak membuat sertifikat hak milik karena tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi mengajukan membuat surat keterangan tanah saat Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) menjabat kepala desa karena untuk pembuatan surat keterangan tanah tidak bisa dibuat oleh kepala dusun hanya kepala desa yang berwenang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pembuatan surat keterangan tanah saat kepala desa nya saudara La Muslim tetapi karena minimnya listrik

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masuk di desa jadi tidak dibuat surat keterangan tanah tersebut, baru saat Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) menjabat sebagai Pjs kepala desa baru dibuat;

- Bahwa yang menyebabkan Saksi mengajukan kembali surat keterangan tanah saat Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) menjabat pejabat sementara kepala desa karena saat itu Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) memiliki laptop dan berdomisili di Desa Gandasuli jadi Saksi mengajukan permohonan kepada kepala desa Gandasuli pada bulan April tahun 2016;
- Bahwa Saksi sendiri ke rumah kepala desa, sesampainya di Pelabuhan Saksi diantar ke rumah kepala desa dan bertemu dengan Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) dan saat itu ditanyakan KTP serta surat permohonan karena tidak ada Saksi lalu pulang;
- Bahwa sebulan sejak Saksi dari Desa Gandasuli sekitar tanggal 24 Mei 2016 Saksi mengundang Terdakwa ke rumah dan memintanya untuk mengurus pembuatan surat keterangan tanah namun belum menyerahkan KTP dan surat permohonan;
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2016 Saksi bersama bapak mertua Saksi yaitu Saksi La Ode Maputi dan terdakwa ke lahan untuk mengukur lebar dan panjang tanah tersebut;
- Bahwa pada saat itu tanggal 23 Mei 2016 terdakwa mau kembali ke Bacan dan dibawakanlah KTP, surat permohonan dan skala, tapi Saksi tidak ikut ke Bacan;
- Bahwa surat tersebut selesai dibuat dan Saksi terima pada tanggal 28 Mei 2016 pukul 18:00 WIT yang diserahkan langsung oleh terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, terdakwa dan Saksi La Ode Maputi tidak ada orang lain dari perangkat desa yang ikut menyaksikan pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sesuatu apa pun kepada terdakwa dan Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah);
- Bahwa keterangan yang Saksi terima baru ditandatangani oleh Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) dan belum ditandatangani oleh terdakwa, Saksi La Ode Maputi dan saudara La Ode Badarudin yang namanya tertera dalam surat tersebut;
- Bahwa terdakwa, Saksi La Ode Maputi dan saudara La Ode Badarudin menandatangani surat tersebut pada tanggal 28 Mei 2016 saat malam hari;

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai pembuatan surat masalah lagi dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru sekitar bulan Agustus tahun 2017 saat saksi korban La Ode Haji Haru menebang pohon cengkeh Saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) pohon tapi saat itu Saksi tidak lihat sehingga tidak dilaporkan;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru juga menebang tanaman cokelat sebanyak 20 (dua puluh) pohon, pada tahun 2018 menebang 3 atau 4 pohon cengkeh;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi tanya mengapa menebang pohon cengkeh Saksi dan dijawab Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak menebangnya dan tidak tahu;
- Bahwa sebelum tanggal 26 Mei 2016 Saksi disuruh membuat surat permohonan tapi karena tidak tahu Saksi meminta terdakwa membuatnya dan Saksi baca kemudian ditandatangani dan tidak keberatan mengenai isi surat tersebut;
- Bahwa kebiasaan di desa untuk mendapatkan kepemilikan terhadap sebidang tanah harus membuka lahan dan membersihkannya ;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan saudara La Taro pada tahun 1994;
- Bahwa saat Saksi La Ode Maputi menyuruh Saksi menjaga tanah tersebut saat itu tidak ada tanaman cengkeh;
- Bahwa pengukuran tanah menggunakan depa dan saat itu Saksi belum mengukurnya dan baru mengukurnya pada tahun 2016;
- Bahwa yang hadir saat mediasi tahun 2015 yaitu saudara Suryani dan Saksi;
- Bahwa hasil kesepakatan mediasi bahwa tanah tersebut milik Saksi Korban La Ode Haji Haru tapi Saksi tidak mau mengakuinya, dan juga mengenai tanah yang Saksi garap adalah milik saudara La Taro;
- Bahwa saat itu Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak hadir hanya dihadiri saudara iparnya saat mediasi tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh perangkat desa surat jual beli antara saudara Reni Mesie dan Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi mengikuti mediasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan pada bulan Juli tahun 2016 bersama saudara ipar yaitu saudara Mohtar, saudara Nasrudin, dari hasil mediasi tersebut yang dituangkan dalam berita acara yaitu jika ada pihak yang berkeberatan dianjurkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April tahun 2016 Saksi diantarkan oleh terdakwa di Desa Tembal untuk kemudian membantu Saksi membuat surat keterangan tanah di rumah Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) di Desa Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada terdakwa karena sudah mengenal dengan baik;
- Bahwa Saksi sudah tahu terdakwa adalah saudara kandung Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi membuat surat keterangan tanah atas nama Saksi padahal tanah tersebut awalnya milik saudara La Taro karena sebelumnya pada tahun 2009 saudara La Taro datang dan mengatakan tanah tersebut dibagi dua lalu pada tahun 2021 dia kembali dan menyerahkan tanah tersebut untuk Saksi garap sendiri yang disampaikan secara lisan dan saat itu disaksikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menunjukkan surat keterangan tanah pada saat mediasi tahun 2016 karena takut surat tersebut diambil oleh kepala desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah melainkan kuitansi dari terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp50.000.00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu membiayai pengobatan istri;
- Bahwa Saksi tidak menjual tanah yang Saksi kelola tersebut, hanya dijadikan jaminan atas tanaman cengkeh sejumlah 130 (seratus tiga puluh) pohon kepada terdakwa;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut dipergunakan untuk menerbitkan sertifikat hak milik tapi belum sampai mengajukan ke Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa selain cengkeh ada tanaman cokelat dan galian emas yang ada di tanah sengketa berawal dari mimpi istri Saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 belum ada masalah tanah terlebih sebelum ada galian di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak mempermasalahkan galian emas pada tahun 2015, 2016, dan 2021 melainkan terkait kepemilikan tanah karena Saksi Korban mengaku yang memiliki tanah.
- Bahwa mediasi 10 April 2021 ada mediasi Saksi dengan Saksi Korban saat kepala desa La Jadi Arsad dan dihadiri oleh Saksi Korban;

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dalam berita acara mediasi lahan kebun tersebut bukan milik Saksi secara sah melainkan disuruh oleh saudara La Taro untuk menanam cengkeh dan hasilnya akan dibagi 2;
- Bahwa tidak benar Saksi memberikan keterangan saat mediasi jika saudara La Taro tidak memberitahu letak tempat secara pasti sehingga Saksi menanam cengkeh di tempat yang salah;
- Bahwa Saksi menanam cengkeh berdasarkan petunjuk dari Saksi La Ode Maputi ayah dari istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat kepemilikan lahan atas nama sdr La Taro karena dari awal saudara La Taro dari awal tidak memiliki atau menunjukkan surat kepemilikan lahan melainkan hanya menanam cengkeh;
- Bahwa surat keterangan tanah yang Saksi punya untuk mengurus sertifikat tidak segera diajukan karena Saksi tidak memiliki uang;
- Bahwa Saksi belum pernah mengajukan sertifikat tanah ke kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji setelah pindah dari Sorong pada tahun 1991;
- Bahwa dulunya Desa Soasangaji masih berbentuk dan bernama Dusun Nusa;
- Bahwa saat Saksi sampai pada tahun 1991 di Desa Soasangaji sudah ada Saksi La Ode Maputi namun belum berbicara terkait lahan maupun kebun;
- Bahwa setelah menikah dengan anak Saksi La Ode Maputi barulah Saksi diminta untuk mengolah lahan yang dari awal disampaikan lahan tersebut milik saudara La Taro;
- Bahwa Saksi mengolah tanah dan lahan tersebut sendiri sementara sdr La Taro hanya menunjukkan batas-batas wilayah dari lahan tersebut;
- Bahwa setelah lahan kebun tersebut dibersihkan oleh Saksi, sdr La Taro sempat melihat lahan yang dibersihkan tersebut;
- Bahwa Saksi awalnya menanam padi, kacang tanah, dan jagung barulah ketika tanaman bulanan tersebut selesai dipanen Saksi menanam tanaman tahunan berupa cengkeh;
- Bahwa Saksi menanam cengkeh mulai awal tahun 1992 dan ditanam secara bertahap dengan rata-rata 4 pohon per hari;
- Bahwa pada tahun 1994 saudara La Taro pernah datang ke kebun dan jumlah pohon cengkeh saat itu sekitar 100 pohon;

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 tanaman cengkeh sudah berbuah dan berukuran besar;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi pergi dari Desa Soasangaji selama 6 bulan untuk bekerja di Papua dan ketika Saksi pulang melihat kebun tanaman cengkeh sudah banyak yang ditebangi;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada keluarga maupun masyarakat siapa yang sudah menebang pohon cengkeh di kebun namun keluarga dan masyarakat juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan terkait tumbangnya pohon-pohon cengkeh di kebun ke pihak desa maupun kepolisian karena tidak ada bukti;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polda Maluku Utara dengan di bawah penekanan dan diancam jika tanah tidak diserahkan ke Saksi Korban La Ode Haji Haru maka jabatan Pejabat Sementara Kepala Desa dicabut;
- Bahwa cara kepemilikan lahan dulunya oleh masyarakat sama yaitu dengan cara membuka lahan dan sudah termasuk dalam hukum masyarakat adat;
- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru belum pernah membuka lahan di tanah tersebut;
- Bahwa saat dilakukan mediasi oleh pemerintah desa, tidak ada Saksi Korban La Ode Haji Haru melainkan hanya iparnya saja;
- Bahwa Saksi Korban datang saat mediasi pada tahun 2021 namun Saksi tidak mengetahui terkait hasil kesepakatan yang ada karena surat kesepakatan tersebut dibuat secara palsu oleh kepala desa atau camat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Korban La Ode Haji Haru secara dekat sebelum tahun 2016 karena Saksi Korban La Ode Haji Haru bukan orang asli Desa Soasangaji melainkan dari Batu Atas;
- Bahwa Lahan milik Saksi Korban didapatkan dari saudara Reni Mesie yang merupakan kakak dari saudara Hengki Mesie yang berasal dari Manado;
- Bahwa mayoritas hampir 100% (seratus persen) penduduk di Desa Soasangaji merupakan suku Buton, namun orang dari Manado bisa memperoleh tanah yaitu saat sebelum ada Desa Soasangaji rata-rata dikelola oleh orang Manado;
- Bahwa Saksi belum memanfaatkan surat keterangan kepemilikan tanah yang dimiliki baik di kantor pertanahan maupun instansi lain;

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa untuk membuat surat kepemilikan tanah karena Saksi ingin tanah milik Saksi diketahui oleh masyarakat dan ketika mau membuat sertifikat sudah ada salah satu syaratnya;
- Bahwa tanah lahan tersebut menjadi milik Saksi sejak tahun 2016 melalui Surat kepemilikan tanah dan sepenuhnya menjadi milik Saksi ketika pada tahun 2021 Saksi membayarkan sejumlah uang kepada Saksi La Ode Sudarmono;
- Bahwa kegiatan penambangan emas di lahan tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu pada keterangan Saksi pada tahun 2021 sudah ada pembayaran kepada Terdakwa sehingga tanah sepenuhnya menjadi milik Saksi dan saat pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah di atas tanah tersebut ada tanaman cengkeh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Rury Irawan, SSi, M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah pemalsuan Surat;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SDN 7 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1988, SMPN 1 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1991, SMAN 1 Selong, Lombok Timur lulus tahun 1994, STPN di Yogyakarta lulus tahun 2001 dan Pasca Sarjana Universitas Mataram lulus tahun 2015;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli yaitu tahun 1995 sampai 1997 PNS Kanwil BPN NTB, tahun 1997 sampai 2001 tugas belajar di STPN Yogyakarta, tahun 2001 sampai 2011 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, tahun 2012 sampai 2017 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, tahun 2017 sampai 2022 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 sampai 15 Maret 2023 PNS di Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur, 16 Maret 2023 sampai saat persidangan menjabat Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa perolehan hak atas tanah itu banyak macam di antaranya hak milik, hak guna usaha, hak bangunan, ada tanah wakaf, yang umumnya dilakukan oleh masyarakat adalah hak milik untuk melakukan secara pribadi atau perorangan, kalau badan hukum perusahaan biasanya Ahli memberikan hak guna bangunan atau hak guna usaha;

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbedaan antara hak milik dengan hak pakai yaitu kalau instansi pemerintah Ahli berikan dalam bentuk hak pakai maupun hak pengelolaan, terkait dengan hak milik, masyarakat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak milik untuk membeli alas hak dan alas hak bervariasi bentuknya sesuai dengan Permenag nomor 3 Tahun 1997 pasal 90 banyak macam jenis alas hak;
- Bahwa salah satu atau beberapa alasan jenis alas hak yaitu surat jual beli, surat keterangan waris untuk pembagian warisnya, surat pembelian dari para manggelang dan bermacam-macam bentuknya;
- Bahwa hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang pertanahan ada dua kategori besar hak perorangan dan hak badan hukum, yang hak perorangan berbentuk hak milik, sedangkan hak badan hukum bisa berbentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun hak pakai dan hak pengelolaan;
- Bahwa kemudian kalau hak pakai hanya diberikan oleh instansi pemerintah, kemudian warga negara asing yang meninggal di Indonesia, pada perorangan secara pribadi atau pribadi orang per orang tidak diberikan hak pakai akan tetapi namanya hak milik dan yang berhak memilikinya hanyalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa terkait akta jual beli yang dibuat seseorang dan diketahui oleh kepala desa menurut Ahli keabsahan dalam arti pengakuan dalam hukum pertanahan secara formal belum diakui kepemilikannya belum sebagai suatu hak atas tanah;
- Bahwa secara formal belum diakui kepemilikannya dikarenakan belum terdaftar di kantor pertanahan kecuali surat jual beli yang dilakukan oleh perorangan yang di saksi minimal 2 (dua) orang saksi dan mengetahui desa itu termasuk kategori alas hak untuk mendapatkan hak atas tanah berdasarkan hukum pertanahan;
- Bahwa terkait penerbitan surat keterangan tanah oleh kepala desa di Halmahera Selatan menurut Ahli untuk mendapatkan sertifikat tak cukup dengan satu surat keterangan, mesti ada surat-surat yang lain dan mesti ada bukti kepemilikan yang lain, yaitu kantor pertanahan baru bisa mengakui seseorang itu atau baru bisa memberi hak atas tanah apabila perluasan fisiknya dilakukan oleh seseorang tersebut;
- Bahwa penerbitan surat keterangan tanah tersebut dikuatkan dengan seseorang tersebut menguasai tanahnya secara fisik, kemudian memiliki legalitas surat-surat yang diakui oleh dirinya dan beberapa orang saksi

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal 2 (dua) orang saksi, kemudian terhadap penguasaan fisik dan kepemilikan dokumen juga dimintakan legalitas atau dimintakan registrasi dari desa supaya kantor pertanahan mengetahui bahwa desa mengetahui bahwa seseorang memiliki hal tersebut;

- Bahwa terkait dapat tidaknya kepala desa menerbitkan surat keterangan tanah menurut Ahli dalam hukum formal yang boleh mengeluarkan hak atas tanah yang tertulis itu adalah kantor Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk sertifikat;
- Bahwa selama tanah yang dimohonkan tidak dalam bentuk sertifikat orang lain atau lembaga lain maka kepala desa sah-sah saja untuk memberikan surat keterangan apa pun isinya, hanya saja dokumen surat keterangan dan surat-surat yang lain dibawa ke kantor pertanahan maka dari pertanahan punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi dan melihat secara fisik apa benar ada yang mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa secara prinsipnya desa boleh menerbitkan surat keterangan tetapi pertanahan yang melakukan verifikasi benar atau berhak apa tidaknya orang tersebut memiliki sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa menurut Ahli apabila desa mengeluarkan dokumen surat kepemilikan dan bukan surat keterangan tanah maka surat kepemilikan tersebut bukan surat bukti hak sehingga surat kepemilikannya tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli terkait siapa saja yang bertanda tangan dalam surat keterangan desa adalah di luar wilayah Ahli untuk menilai karena Ahli tidak punya kewenangan untuk menilai desa berhak apa tidak mengeluarkan surat keterangan;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional sebelum mengeluarkan surat hak atas tanah harus melakukan pengukuran terlebih dahulu untuk membuktikan yang bersangkutan menguasai fisik apa tidak kemudian mengenai dokumen dalam dokumen ini surat keterangan minimal harus ada 2 (dua) orang saksi yang membenarkan isi keterangan, kemudian mengenai isi keterangan badan pertanahan akan mengkonfirmasi dengan cara menanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang ditemukan di lapangan;
- Bahwa kemudian kalau informasi-informasi sudah mendukung semua maka kantor pertanahan akan proses sertifikatnya sehingga intinya kantor pertanahan punya kewenangan menilai benar atau tidaknya surat keterangan kepala desa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait adanya surat keterangan tanah yang diajukan sebagai dasar dalam penerbitan alas hak bahwa dari Badan Pertanahan Nasional sendiri membawa dokumen tersebut dengan pemohon misalnya mau membuat sertifikat yang pertanahan konfirmasi pertama kami bertanya ulang tentang isi dari surat keterangan;
- Bahwa hal yang dikonfirmasi kedua kali kalau petugas pertanahan menemukan orang yang berada di sekitar lokasi tanah akan ditanyakan ke orang tersebut benar tidaknya jika tanah yang dimohonkan dikuasai oleh pemohon karena pemohon ingin mengajukan pembuatan sertifikat;
- Bahwa apabila ada orang lain yang berada di lapangan memberikan informasi yang mendukung maka petugas pertanahan melanjutkan prosesnya jadi tidak cukup hanya melihat surat-surat saja;
- Bahwa sepengetahuan Ahli surat keterangan yang dibuat atau dimohonkan dari desa-desa bukan hanya di Kota Ternate melainkan hampir di semua desa yang pernah Ahli lalui karena Ahli sudah pernah bertugas di 5 (lima) kantor pertanahan dan hampir di 5 (lima) kabupaten tersebut desa sering mengajukan surat keterangan tanah;
- Bahwa surat keterangan tanah fungsinya sebagai tambahan berkas saat mengajukan permohonan karena apabila pemohon menginginkan sertifikat maka perlu melampirkan surat pernyataan penguasaan fisik pertama, kemudian didukung lagi oleh surat pemohon miliki misalnya surat jual beli, atau surat waris, atau surat lelang, atau surat pembagian harta bersama, kemudian dengan surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa seseorang yang memiliki tanah;
- Bahwa apabila semua dokumen tersebut berhubungan semua isi dan informasinya maka bisa dijadikan alas bukti untuk diajukan di kantor pertanahan;
- Bahwa harus ada data penguasaan fisik dan data yuridis di antaranya data yuridis itu pertama surat pernyataan penguasaan fisik tertulis yang ditandatangani oleh yang menyatakan biasanya pemohon dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi, jadi surat itu minimal ada 3 (tiga) orang yang bertanda tangan, kemudian ada lagi surat keterangan desa yang bertanda tangan kepala desa dan minimal ada 2 (dua) orang saksi yang mendukung keterangan si kepala desa;
- Bahwa dikaitkan perkara Terdakwa dimana sudah terdapat surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah, surat keterangan yang menyajikan batas-batas secara fisik dan surat keterangan kepemilikan

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sudah memenuhi syarat untuk mengajukan surat hak atas tanah atau mengajukan sertifikat, sebagai syarat untuk mengajukan sertifikat;

- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah tersebut juga dapat dijadikan sebagai suatu bukti sebagai alas hak;
- Bahwa dapat atau tidaknya surat keterangan dijadikan sebagai suatu bukti sebagai alas hak merupakan kewenangan majelis hakim yang menilainya dan Ahli tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian;
- Bahwa terkait tidak adanya perbuatan hukum yang menimbulkan surat keterangan tanah namun tiba-tiba surat keterangan bisa terbit apabila dilihat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 Tahun 1997 disebutkan contoh-contoh alas hak ada banyak jenisnya yaitu surat jual beli, surat waris, surat jalan, surat harta bersama dan sebagainya apabila itu tidak ada maka bisa diganti dengan yang namanya surat yang menyatakan penguasaan fisik secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik ini ditandatangani oleh orang yang mengaku mempunyai tanah kemudian disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa terkait ketentuan penguasaan tanah selama 20 tahun secara berturut-turut pandangan Ahli kalau ada orang lain yang memiliki tanah kemudian orang tersebut meninggalkan lokasi tanahnya, kemudian dikuasai oleh orang lain, menurut Ahli tidak melanggar dan mestinya tidak terjadi karena menurut aturan yang Ahli ketahui, pemilik tanah itu punya kewajiban untuk menjaga, memanfaatkan dan memelihara tanahnya sendiri, apabila ada yang meninggalkan lokasi tanahnya kemudian diambil oleh orang lain Ahli mungkin tidak bisa menilai apakah itu benar apa tidaknya;
- Bahwa bagi Badan Pertanahan Nasional istilah menelantarkan tanah itu hanya pada tanah yang sudah disertifikatkan, pada saat Badan Pertanahan Nasional sudah memberikan haknya dalam bentuk sertifikat kemudian ditinggalkan itu akan dikatakan itu terlantar, tetapi untuk lokasi-lokasi tanah yang belum diterbitkan sertifikat Ahli tidak bisa memberikan itu kategori terlantar atau tidak;
- Bahwa dalam surat keterangan yang dibuat desa biasanya terdapat 3 (tiga) saksi yang menjadi syarat minimal dalam membuat surat keterangan tanah namun hal tersebut menurut pengalaman Ahli saksi bisa minimal 2

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang dan syarat secara aturan tidak ada tertulisnya jumlah saksi yang disyaratkan menjadi saksi tapi berdasarkan pengalaman Ahli akan bertanya apakah saksi yang diajukan layak atau tidak;

- Bahwa layak atau tidaknya saksi tersebut dalam konteks umur saksi dan umur surat, apakah masuk akal atau tidaknya pada saat orang tersebut menjadi saksi pada saat bertanda tangan memang sudah cukup umur, kemudian dari segi letak tempat tinggal orang tersebut melewati tanah dengan tempat tinggal akan Ahli tanyakan pada saat pemeriksaan tanah, jadi standar tertulisnya tidak ada kriteria yang mengharuskan syarat seorang saksi;

- Bahwa terkait kepemilikan tanah pada praktiknya yang terjadi terdapat kepala desa bahkan camat pada periode tertentu menyatakan suatu objek tanah betul milik pemilik namun pada periode selanjutnya kepala desa menyatakan tanah bukan milik pemilik tersebut maka menurut pendapat Ahli kalau diajukan untuk permohonan tanah kantor pertanahan harus mendapatkan informasi yang sepadan atau sama semua sehingga proses pendaftaran tanahnya dilanjutkan;

- Bahwa apabila dari sekian orang tidak dipertanyakan ada 1 (satu) saja yang menyatakan hal yang berbeda atau bertentangan, maka proses pendaftaran tanahnya oleh kantor pertanahan akan diberhentikan atau tunda, kemudian penundaan itu disampaikan kepada yang bersangkutan untuk melakukan mediasi biasanya setelah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi tidak berhasil maka kantor pertanahan sarankan ke pengadilan;

- Bahwa menurut ahli kantor pertanahan agak sensitif kalau terdapat informasi yang berbeda dalam pendaftaran sertifikat tanah, sehingga akan ditunda dulu proses pendaftaran tanah dan pekerjaan sertifikat, hal itu adalah prosedur yang kantor pertanahan lakukan misalnya ada 99 (sembilan puluh sembilan) informasinya sama semua ada 1 (satu) informasi yang berbeda maka yang berbeda itu kantor pertanahan perlu hati-hati sehingga biasanya kantor pertanahan lakukan mediasi;

- Bahwa apabila mediasi tidak berhasil kantor pertanahan berikan kesempatan kepada yang bersangkutan yang keberatan 1 (satu) orang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tetapi apabila tidak dilakukan maka kantor pertanahan anggap 99 (sembilan puluh Sembilan) informasi ini benar sehingga bisa terbit sertifikat;

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa menurut pendapat Ahli yang berhak melakukan penetapan batas dan pengukuran tanah hanyalah petugas kantor pertanahan, tetapi penetapan batas ini dilakukan berdasarkan penunjukan batas dari orang yang merasa memiliki tanah, jadi bukan desa maupun pihak lain tetapi orang yang mengklaim yang merasa memiliki tanah akan ikut dalam penunjukan batas jika tidak ada protes maka BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengatakan berarti benar lokasi dan batas tanah tersebut lalu proses slat untuk sertifikat;
- Bahwa apabila pada saat penunjukan batas terjadi keberatan dari orang lain maka BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak melakukan penetapan, dan akan menunda proses penetapannya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli surat pernyataan penguasaan fisik lahan tanah, dalam surat keterangan biasanya instansi pemerintah sehingga pegawai bisa mewakili pemerintah desa, jadi BPN (Badan Pertanahan Nasional) membedakan antara surat keterangan dengan surat pernyataan yaitu surat-surat keterangan itu biasanya dari instansi atau badan hukum, kalau surat pernyataan dari orang perorangan, namun surat keterangan yang baru masuk harusnya ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan, kalau itu surat keterangan desa berarti kepala desa yang mengeluarkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam membuat surat keterangan tanah dalam tingkat desa yang biasa menjadi saksi adalah kepala dusun atau kepala Rukun Tetangga (RT) atau kepala lingkungan atau orang yang dituakan tokoh masyarakat, biasanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) lebih senang dengan kesaksian dari orang-orang tersebut, tetapi ada kesaksian yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan, maka biasanya BPN (Badan Pertanahan Nasional) bertanya bahwa orang tersebut layak tidak menjadi saksi dari segi umur, dan lokasi tinggalnya dengan lokasi tanah;
- Bahwa dasar hukum penelantaran tanah adalah undang-undang pokok agraria, undang-undang nomor 5 Tahun 1960, kemudian dilengkapi dengan peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997, kemudian dilengkapi lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 Tahun 1997, dan Permenag terbaru nomor 18 Tahun 2021;
- Bahwa titik koordinat adalah posisi peta jadi tanah sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat tidak bisa andon titik koordinatnya, jadi titik

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



koordinatnya tidak berkaitan dengan tanah yang sudah bersertifikat atau belum bersertifikat;

- Bahwa titik koordinat bisa dilihat sekarang juga pada peramban di setiap *handphone* dan bisa melihat titik koordinatnya di situ;
- Bahwa apabila terdapat dua surat tanah yang tumpang tindih dalam permohonan sertifikat maka kedua surat itu dijadikan sebagai alas hak sehingga pertanahan akan melakukan proses pengukuhan yang pertama, kemudian dicocokkan surat yang satu punya A yang satu punya B, A melakukan proses pendaftaran B melakukan proses pendaftaran, pada saat A mendaftar maka BPN akan melakukan proses pengukuran di lokasi A, kemudian nanti permohonan B datang lagi dan BPN akan melakukan pengukuran pada tanah B dan ternyata pada lokasi itu sah dan bersamaan maka proses pendaftaran tanah tidak akan dilanjutkan;
- Bahwa ahli tidak bisa memutuskan bahwa surat tanah mana yang sah tidak sah karena Ahli tidak punya kewenangan untuk memutuskan;
- Bahwa dalam Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai istilah untuk tanah yang belum bersertifikat;
- Bahwa tanah yang sudah bersertifikat akan dikategorikan tanah terlantar setelah kantor pertanahan melakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan, lalu menegur yang bersangkutan untuk memanfaatkan tanahnya sesuai dengan yang diperuntukkan yang kantor pertanahan berikan, sifatnya 3 (tiga) kali teguran tidak juga diindahkan maka kantor pertanahan tetapkan sebagai tanah terlantar;
- Bahwa data yuridis adalah dokumen surat-surat, dan data fisik adalah penguasaan fisik dimanfaatkan, jadi batasnya pemilik tahu tanahnya dia manfaatkan;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah agar seketika bisa diakomodir data yuridis dan data fisik harus ada;
- Bahwa sepengetahuan ahli terkait surat keterangan dan surat jual beli baik milik Saksi Korban La Ode Haji Haru maupun Terdakwa belum pernah dimohonkan untuk penerbitan sertifikat;

**2. Dr. Faissal Malik, S.H., M.H.,** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia untuk memberikan keterangan atau pendapat sesuai kompetensi Ahli di bidang Hukum Pidana dan Ahli memberikan keterangan selaku Ahli berdasarkan surat permintaan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Nomor: B/979/X/2022/ Ditreskrimum,

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2022, dan berdasarkan Surat Penugasan dari Direktur Pascasarjana Universitas Khairun Ternate Nomor: 1440/UN44-CB/HK.04./2022, tanggal 1 November 2022 guna memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Pidana;

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu SD Negeri Tuakara Kec. Loloda Lulus Tahun 1985 (berijazah), SMP Muhammadiyah Ternate lulus Tahun 1987 (berijazah), SLTA Islam Ternate Lulus Tahun 1990 (berijazah), Sarjana Hukum (SH/ S.1) di Universitas Khairun Ternate Konsentrasi Hukum Pidana lulus Tahun 1995 (berijazah), Magister Humaniora (M.Hum./ S.2) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus Tahun 2005 (Berijazah), Doktor Ilmu Hukum (Dr/ S.3) Konsentrasi Hukum Pidana, pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta lulus Tahun 2018 (Berijazah);
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli yaitu tahun 1997, diangkat sebagai Dosen Yayasan Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, tahun 1997 sampai sekarang mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, tahun 2002 diangkat sebagai Dosen PNS pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, tahun 2018 sampai sekarang Pengajar pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Khairun Ternate;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat penyidikan, antara lain memberi keterangan Ahli dalam Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan Jembatan Sungai Ramdi bentangan 40 Meter pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Halsel, (APBN TA 2012) di UPT Nusliku SP 3 Kec. Gane Timur, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 713/UN.44-C1/KS.05/2018;
- Bahwa Ahli pernah memberikan Keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Kawin Tanpa Izin yang dilakukan oleh Sdr. Wahid Umar dan Sdri. Bety Miliyawati, di Polda Direktorat Reserse Kriminal Umum Berdasarkan Surat Tugas Nomor:364/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana di bidang Perbankan dengan cara menghimpun dana masyarakat tanpa Izin Bank Indonesia di Polda Dirkrimsus Kriminal Khusus Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 118/UN44-C1/KS.05/2019;

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan terjadinya Tindak Pidana ASN dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Polres Tidore Kepulauan, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 123/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum, di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 257/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 258/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait penyidikan terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Barat, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 259/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Polres Halmahera Selatan, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Nomor: 100/UN44-C1/KS.05/2019;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 198/UN44-C1/KS.05/2020;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 199/UN44-C1/K.S.05/2020;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, terkait Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Maluku Utara, Berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor 204/UN44.C1/PP.02/2020;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli tentang Praperadilan atas penetapan tersangka "IR" dalam dugaan tindak pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Nomor 821/UN44.C1.02/2020;

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli, dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa "IR" di Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Tobelo atas penyidikan tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 512/UN44.C8/11/2021;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Ternate atas penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Premi Nasabah pada PT, Asuransi Jiwasraya (Persero), berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 838/UN44.C8/LL/2021;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula di Sanana, atas penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengadaan lampu *solar single ornament* pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 038/UN44.C8/LL/2022;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Reskrim Polres Halmahera Timur atas penyidikan dugaan tindak pidana membuka rahasia, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 202/UN44.CB/LL/2022;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Permintaan Penasihat Hukum tersangka Allen Goslaw, "Hendra Kasim Dkk" Permohonan Praperadilan, di Pengadilan Negeri Soasio Tidore, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 224/UN44.C8/LL/2022;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Pengadilan Negeri Tobelo, hari Rabu Tahun 2022, atas permintaan Penasihat Hukum tersangka G. Iskandar Joisangsangai Dkk, dalam dugaan tindak pidana pemerkosaan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli di Satuan Reserse kriminal Polres Ternate atas penyelidikan dugaan tindak pidana pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atau penggelapan dan atau penipuan, Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pascasarjana Nomor 283/UN44.C8/HM.04/2022;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Direktur Pascasarjana Nomor 1199/UN.44.CB/HK.04/2022,

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Ternate;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam memberikan keterangan Ahli pada saat ini, Ahli diberikan Surat izin dari Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate untuk memberikan keterangan Ahli Nomor: 1440/UN44-CB/HK.04./2022, tanggal 1 November 2022, guna memberikan pendapat selaku Ahli Hukum Pidana yang ditanda tangani oleh Direktur Pascasarjana Universitas Khairun Ternate;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru Dan Terdakwa Wa Ode Yusna Kaimudin, Terdakwa La Ode Sudarmono, Serta Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid;

- Bahwa Perlu Ahli jelaskan bahwa, Hukum Pidana adalah Keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana melingkupi pada materi yang berkaitan dengan, (i) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil; (ii) Hukum Pidana Obyektif dan Hukum Pidana Subyektif; (iii) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus; (iv) Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional; dan (v) Hukum Pidana berdasarkan Adresat;

- Bahwa Pasal 266 ayat (1) KUHPidana rumusannya, sebagai berikut: Ayat (1): Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat akta Otentik dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa unsur-unsur delik yang dirumuskan dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut: Barang siapa; mengandung perorangan/*persoonlijk* ataupun suatu badan usaha/badan hukum yang arti Setiap orang (baik itu orang disebut dengan *rechtspersoon*) yang diembani hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, delik kedua yaitu Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



mengandung arti memasukkan keterangan yang diberikan seseorang kepada pegawai Umum, dimana isi dari keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau dengan kata lain keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Dimana keterangan yang palsu tersebut dimasukkan ke dalam Akta yang harus dibuat oleh Pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu benar, delik ketiga yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mengandung arti bahwa adanya kehendak/pengetahuan untuk "menyuruh melakukan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, dimana orang yang disuruh melakukan itu melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh yang menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut;

- Bahwa Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana rumusannya, sebagai berikut Ayat (1): "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena Pemalsuan, Ayat (2): "Diancam dengan hukuman yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat Palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian";
- Bahwa unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut di dalam tindak pidana "pemalsuan surat" terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan, yakni "membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*)" dan "memalsukan surat (*vervalsen*)". Tindak pidana "membuat surat palsu baru yang (*valschelijk opmaaken*)", maknanya membuat surat sebelumnya tidak ada, yang seolah-olah asli atau seolah-olah mengandung nilai kebenaran atau keaslian, baik bentuk maupun isinya, sedangkan tindakan "memalsukan surat (*vervalsen*)", maknanya sebelumnya telah ada surat yang asli, dan surat asli dimaksud diubah bentuk maupun substansinya



yang seolah-olah asli dan benar adanya, seperti tindakan menambah, mengurangi atau mencoret isi dari surat yang asli;

- Bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan tersebut mengandung esensi, bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.- Tindakan yang dilarang (delik formil) menurut pasal 263 KUHP, adalah tindakan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) atau memalsukan surat (*vervalsen*) yang seolah-olah asli atau benar adanya, Kebenaran yang dimaksud meliputi kewenangan membuat, substansi surat, dan prosedur pembuatan. Kewenangan membuat, artinya legalitas dan legitimasi tindakan yang dilakukan menurut aturan hukum yang ada; substansi surat, meliputi: bentuk (*form*) surat, isi surat dan identitas pembuat; sedangkan prosedur pembuatan, meliputi: tata urutan atau mekanisme pembuatan surat;

- Bahwa hakikat tindakan memalsu, adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, menambah, mengubah atau mengganti substansi atau salah satu isinya surat sehingga berbeda atau berubah dengan surat aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Bentuk tindakan/perbuatan dan surat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, maksudnya dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, di mana harus dibuktikan salah satu bentuk tindakan/perbuatannya dan salah satu objek surat yang dipalsukan;

- Bahwa akibat yang dilarang (delik materiil) dalam pasal 263 KUHP, adalah timbulnya kerugian atas pemakaian/penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut;

- Bahwa unsur yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif, adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, dan unsur subyektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku;

- Bahwa unsur obyektif, meliputi perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan kedua dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;





- Bahwa unsur subyektif, meliputi dengan maksud dan kedua untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai yang seolah-olah benar seperti surat asli atau tidak palsu;
- Bahwa unsur-unsur rumusan Pasalnya, sebagai berikut "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat", artinya suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar adanya dan tidak palsu;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Perbuatan membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemalsuan intelektual (*intellectuele valsheid*);
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan pemalsuan materiil (*materiele valsheid*);
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa, di mana sebelum perbuatan dilakukan, tidak ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi surat palsu atau surat tidak asli;
- Bahwa perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Memalsu surat, artinya sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada sebuah surat, yakni surat yang asli, kemudian pada surat yang asli tersebut isinya, tandatangan si pembuat atau nama si pembuat surat asli dipalsukan, akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenarannya atau palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memalsukan surat-Unsur *a quo*, adalah sebagai unsur obyektif dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (*delict formil*);
- Bahwa unsur "dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal", tafsirannya, bahwa dari dibuatnya surat palsu atau dipalsukannya surat, berakibat dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dibuatnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibat dimaksud dilarang oleh hukum (*delict materiil*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur "seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", mengandung pengertian, bahwa surat yang dibuat atau surat yang dipalsukan *a quo*, dianggap atau diakui sebagai sesuatu yang benar adanya, sedangkan tidak benar adanya, artinya surat palsu dan yang dipalsukan *a quo* sesuai kebenarannya, namun dianggap benar adanya;
- Bahwa unsur "dengan maksud" (*met het van oogmerk*). Penafsirannya, bahwa suatu perbuatan dilakukan diliputi maksud (*oogmerk*) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atas surat yang dipalsukan tersebut, artinya memakai atau menyuruh orang memakai sebagai maksud dan perbuatan dimaksud dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa surat dimaksud tidak benar adanya atau palsu;
- Bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian", mengandung makna, bahwa atas pemakaian surat palsu *a quo* dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriell. Dengan demikian jika surat palsu dimaksud dibuat namun tidak digunakan atau tidak diperuntukkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan *a quo* tidak diancam pidana penjara karena pemalsuan surat;
- Bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP, yakni ketika unsur yang terumuskan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi, kemudian surat palsu atau yang dipalsukan *a quo* digunakan. Terhadap penggunaan surat yang dipalsukan tersebut diancam pidana yang sama dengan ayat (1), yakni pidana penjara enam tahun, apabila dari penggunaan surat palsu dimaksud menimbulkan kerugian.;
- Bahwa Pasal 421 KUHPidana rumusannya, sebagai berikut Pegawai Negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan;
- Bahwa unsur "Pegawai Negeri", artinya: setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa unsur "dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya untuk membuat", artinya kekuasaan yang digunakan itu melampaui batas, dengan memaksa dengan melawan hak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur "tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa", artinya tidak berbuat atau tidak mengerjakan sesuatu atau tidak melarang atau mencegah terjadi sesuatu apa;
- Bahwa Pasal 55 ayat 1 Ke-1e KUHPidana rumusannya sebagai berikut"  
Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";
- Bahwa Unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 Ke-1e KUHPidana tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut;
- Bahwa "*Plegen*" diartikan sebagai yang melakukan, sedangkan kata "*pleger*" dapat diartikan sebagai "Pelaku". Siapa yang menjadi pelaku dari suatu perbuatan pidana tentunya tidak terlepas dari apa yang dirumuskan oleh undang-undang, Hazewinkel Suringa mendefinisikan pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan delik tersebut. Sedangkan Zevenbergen mendefinisikan pelaku adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik;
- Bahwa *Doenplegen* artinya Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari "*doenplegen*", sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah "*doenpleger*". Menurut sejarahnya, bentuk penyertaan "*doenplegen*" sebenarnya tidak dikenal dalam *Code Penal* Perancis sebagai induk dari *Wetboek van Strafrecht*. Orang menyuruh lakukan dimasukkan sebagai pelaku dalam pengertian yang luas, sedangkan orang yang disuruh hanyalah sebagai instrumen. Oleh karena itu dalam MvT dijelaskan bahwa pelaku bukan saja ia yang melakukan perbuatan pidana, melainkan juga orang yang melakukan secara in persona tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya. Dalam penyertaan menyuruh lakukan atau "*doenplegen*" paling tidak ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai "*manus domina* atau *middelijke dader*" dan orang yang disuruh disebut sebagai *onmidde lijkedader* atau *manus ministra*. *Doenplegen* juga disebut sebagai *Middelijke daderschap* yang berarti seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Kendatipun demikian, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri;

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa *Medeplegen* dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Mengenai istilah "*medeplegen*" pada awalnya digunakan kalimat "*opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken*" (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan). Istilah tersebut mendatangkan keberatan karena tidak terlihat perbedaan dengan pembantu yang memberikan bantuan pada saat perbuatan dilakukan menurut Van Hamel, perbuatan orang yang *medeplegen*, selain merupakan penyertaan yang lengkap, juga orang-orang yang terlibat harus melakukan seluruh perbuatan. Simons, mengartikan *medeplegen* adalah orang yang turut melakukan sehingga harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan harus memiliki oleh seorang pelaku. Barang siapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana tersebut, jika disyaratkan harus ada sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana, maka mereka yang juga memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan, Van Bemmelen dan van Hattum berpendapat bahwa *medeplegen* pada hakikatnya hanya mungkin pada perbuatan yang merupakan delik. Pada delik materiil perbuatan tersebut *adequate kausal* dengan akibat;
- Bahwa *Uitlokking* secara harfiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut sebagai *uitokker*. Van Hamel memberi pengertian *uitlokking* sebagai kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu. Sama halnya dengan bentuk menyuruhlakukan (*doenplegen*) bentuk penyertaan *uitlokking* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan. Orang yang menganjurkan disebut *bauctor materialis* atau *matetrievele dader*. *Pluspeccat auctor quam actor* (orang yang menggerakkan suatu kejahatan dipandang lebih buruk daripada yang melakukannya);
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Akta Autentik dalam hukum Administrasi Negara adalah suatu dokumen yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, ada motivasi, ada kehendak, dibuat dalam prosedur format dan syarat yang ditetapkan dalam tata naskah dinas serta tidak bertentangan dengan peraturan umumnya, suatu akta otentik dalam suatu



dokumen negara atau pemerintah berlaku mengikat dan memiliki daya guna secara publik karena dibentuk berdasarkan wewenang yang sah pada pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Yang termasuk akta autentik dalam administrasi negara adalah surat Keputusan, Memorandum, Ketetapan, Rencana, atau Norma Jabaran;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa akta otentik merupakan akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, dikarenakan dibuat oleh pejabat tertentu yang memiliki wewenang, sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di Pengadilan; sedangkan akta bukan otentik merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, sehingga kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan tidak sesempurna akta otentik;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh atau surat sejenisnya yang diterbitkan oleh Kepala Desa merupakan Akta otentik karena surat keterangan yang diterbitkan tersebut, Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai Jabatan Umum, sehingga memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru memiliki surat jual beli tanggal 08 Oktober tahun 1986 berlokasi di Desa Soasangaji Kecamatan, Obi Barat, Kab. Halsel Prov. Maluku, 2 lembar Berita Acara Keputusan Nomor : 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji. (hasil mediasi tingkat Desa), 2 lembar surat keputusan penghentian Nomor: 152 / K-OB/140/IX/2021, tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat (hasil mediasi kecamatan);

- Bahwa dalam kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh korban, namun pada tahun 2016 terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHRU dan terlapor Sdr. LA ODE SUDARMONO membuat Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016 mengetahui oleh Pjs. Kepala Desa Soasangaji a.n. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, dimana dalam surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh adalah milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. Sehubungan dengan fakta ini berkaitan dengan surat jual beli milik korban sdr. LAODE HAJI HARU tanggal 08 Oktober 1986, dan Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, maka dugaan tindak pidana pemalsuan surat berupa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh, disebabkan dalam satu obyek tanah terdapat dua kepemilikan surat dimana milik korban sdr. LA OD HAJI HARU dengan SURAT JUAL BELI tahun 1986 sementara pihak terlapor LA ODE BAHARUDIN OED MADJID dan terlapor LA ODE SUDARMONO memiliki Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh tahun 2016;

- Bahwa menurut keterangan saksi Korban LA ODE HAJI HARU. Menjelaskan bahwa pada tahun 1986 korban telah membeli lahan kebun dari sdr. RENI MASIE seharga Rp.75.000.000,- yang bertempat di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Selatan berdasarkan surat jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, yang di buatkan oleh Kepala dusun Alm. La Ode Sehe;

- Bahwa terlapor a.n. sdr. La Daharu telah menguasai lahan kebun/miliknya sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dengan cara menanam pohon cengkeh di kebun milik korban dan sampai dengan saat ini terlapor sdr. LA ODE NAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU mengaku bahwa lahan kebut yang menjadi sengketa sebagian adalah miliknya, dan sampai dengan saat ini juga terlapor masih terus mengelola lahan milik korban;

- Bahwa Saksi Korban menjelaskan sekitar di bulan September 2021 terlapor a.n. saudara LA ODE SUDARMONO memberitahu kepada korban kalau lahan/kebut tersebut sudah menjadi miliknya dengan alasan karena terlapor sdr. La Ode Sudarmono sudah membeli lahan/kebut tersebut dari terlapor sdr. Laode Baharudin, sambil menunjukkan bukti pembelian berupa satu lembar kuitansi dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan terlapor memasang papan pemberitahuan bahwa lahan kebun yang menjadi sengketa adalah milik La Ode Sudarmono, dan yang memasang papan tersebut adalah terlapor sdr. La Ode Baharudin Alias La Daharu;

- Bahwa benar pada tahun 2016 kedua terlapor membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3 /02-2016, dan 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh dengan kepemilikan a.n. terlapor sdr. La Ode

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin. Mengetahui Pjs. Kepala Desa Soasangaji a.n. Wa Ode Yusna Kaimudin;

- Bahwa menurut keterangan saksi La Jati Haji Arsad (kades) menjelaskan bahwa

- lahan/kebun tersebut adalah benar-benar milik korban sdr. La Ode Haji Haru, berdasarkan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, 2 (dua) lembar berita acara Keputusan Nomor : 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021, yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji, menjelaskan tentang mediasi tingkat desa, dan dari hasil mediasi tersebut dengan kesimpulan bahwa lahan kebun tersebut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat Jual beli tahun 1986;

- Bahwa benar kedua terlapor sdr. LA DAHARU dan sdr. LA ODE SUDARMONO membuat kuitansi pembelian lahan kebun yang menjadi sengketa antara terlapor sdr. LA DAHARU dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO, kemudian para terlapor juga membuat dan memasang papan pemberitahuan di lokasi kebun/milik korban dengan kata-kata bahwa lokasi kebun tersebut adalah milik LA ODE SUDARMONO;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kedua terlapor tidak mempunyai alas hak atas tanah pada lahan/kebun yang menjadi sengketa. Namun kemudian pada tahun 2016 terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU dan sdr. LA ODE SUDARMONO membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016, dan 1 lembar Surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh dengan kepemilikan a.n. terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN. Mengetahui PJS Kepala Desa WA ODE YUSNA KAIMUDIN;

- Bahwa menurut keterangan saksi NASARUDIN HI. ISMAIL (Camat Obi Barat) menjelaskan bahwa benar pada tahun 1986 saksi korban telah membeli lahan kebun dari sdr. RENI MASIE seharga Rp. 75.000.000,- yang bertempat di Desa Soasangaji Kec. Obi BARAT Kab. Halmahera Selatan berdasarkan surat bjual beli tertanggal 08 Oktober 1986, yang di buatkan oleh Kepala dusun Alm. LA ODE SHE

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar surat keterangan tanah tersebut milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU karena pada saat kedua terlapor datang ke kantor camat dan menunjukkan kepada saksi bahwa mereka memiliki surat keterangan kepemilikan tanah a.n. terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN;

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa lahan yang menjadi sengketa adalah milik korban saudara LA ODE HAJI HARU, karena pada tanggal 30 Juli tahun 2016 bertempat di Kantor Camat Obi Barat saksi melakukan mediasi dan mempertemukan kedua bela pihak, yakni pihak keluarga sdr. LA ODE HAJI HARU dan pihak LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. Dan pada saat itu yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan hanya dari pihak keluarga korban Sdr. LA ODE HAJI HARU berupa surat jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, dengan dukungan notulen rapat dari Desa Soasangaji sehingga Saksi saat itu selaku kepala seksi pemerintahan di Kec. Obi Barat membuat berita acara rapat untuk pengembalian lahan kepada pemiliknya sdr. LA ODE HAJU HARU;
- Bahwa terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN alias LA DAHARU dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO untuk menguasai lahan/kebun milik korban sdr LA ODE HAJI HARU, karena pada tahun 2021 mereka mendatangi dan memarahi saksi bawa kenapa saksi mencabut papan kepemilikan lahan dan mereka (kedua terlapor) menunjukkan bukti surat berupa kepemilikan tanah, kuitansi jual beli dan meminta agar pihak kecamatan mencabut berita acara kembalikan hak milik korban sdr LA ODE HAJI HARU tahun 2016 yang di dikeluarkan oleh Kecamatan Obi barat, kemudian terlapor juga masih mengelola lahan/kebun milik korban hingga sampai saat ini;
- Bahwa menurut keterangan saksi JAKARUDIN, S.Pd., M.Pd. (mantan camat Obi Barat) menjelaskan pada tanggal 27 Agustus 2021 korban LA ODE HAJI HARU mengadu ke saksi sebagai Camat Obi Barat terkait lahan kebunnya yang di garap oleh terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, dan di saat korban LA ODE HAJI HARU mengadu kepada saksi korban melampirkan surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986 miliknya, dengan lokasi kebun di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Hal-Sel dan adanya surat/ berita acara keputusan No.235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji a.n. La Jati Haji Arsad. Kemudian saksi melakukan mediasi antara kedua bela pihak dan dari hasil mediasi tersebut, dibuatkanlah 2 (dua) lembar foto Surat Keputusan Penghentian nomor: 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat, dengan hasil mediasi bahwa lahan kebun tersebut adalah korban milik sdr. LA ODE HAJI HARU, dengan surat tersebut saksi beserta dengan staf desa, babinsa, melakukan pengukuran di lokasi

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat jual beli dan berita acara dari Desa, dan dengan hasil pengukuran tersebut bahwa lahan tersebut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat jual beli tahun 1986, dan berita Acara dari tingkat Desa, bukan milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada tahun 2021 saat Saksi melakukan pengukuran lahan tersebut, bahwa terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak menunjukkan surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 April 2016 a.n. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang dimilikinya semenjak tahun 1992, namun saat itu hanya pengakuan lisan saja dari terlapor bahwa lahan kebun milik korban adalah milik terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID;

- Bahwa keterangan saksi SURIANA ODE PIKA (mantan sekdes) menjelaskan sebagai berikut pada waktu saksi masih menjabat sebagai Sekdes Soasangaji pada tahun 2015 saksi pernah melakukan mediasi antara kedua belah pihak antara terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADID Alias LA DAHARU dengan korban sdr. LA ODE HAJI HARU, dan pada saat mediasi tersebut korban LA ODE HAJI HARU dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986, sedangkan terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya, ia hanya berdasarkan penyampaian secara lisan bahwa lahan kebun tersebut yang ia tempati adalah pemberian dari sdr. LA TARO;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan tanah Nomor : 593.3/02/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan tidak terarsip di Kantor Desa Soasangaji, dan selama saksi menjabat sebagai sekdes pada taun 2016 saksi tidak pernah mengeluarkan surat keterangan hak kepemilikan lahan kebun cengkeh tersebut;

- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui surat keterangan kepemilikan lahan kebun cengkeh apalagi sampai membuat dan menandatangani sama sekali tidak pernah;

- Bahwa benar pada saat selama saksi menjabat sebagai sekdes Soasangaji tidak adanya buku register atau agenda surat keterangan kepemilikan tanah. dan setahu saksi terlapor LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU tidak mempunyai kebun atau lahan di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi LA ODE MUH. ZAINAL HASAN (sekdes 2016) pada bulan Januari s/d bulan Mei 2016 saksi menjabat sebagai sekdes Soasangaji yang ditunjuk langsung secara lisan oleh PJS Kepala Desa Soasangaji a.n. WAODE YUSNA KAIMUDIN;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai sekdes di tahun 2016 saksi tidak pernah membuat surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh Nomor: 593.3./02-2016 a.n. tertanggal 26 April 2016 milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang dimiliki sejak tanggal 02 Mei 1992 sesuai yang terdapat dalam surat tersebut, saksi baru melihatnya pada saat di diperlihatkan oleh pemeriksa, dan saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut, dan penomoran surat tersebut saksi tidak pernah berikan nomor yang dimaksud dalam surat tersebut, dan mengenai seketsa atau peta ukuran tanah ini saksi juga tidak tahu;
- Bahwa menurut keterangan saksi LA ODE MAPUTI (bapak mertua terlapor) Saksi menjelaskan bahwa semenjak saksi masuk ke obi pada tahun 1982 dan tinggal di Pulau Tusa, dan waktu itu Desa Soasangaji masih kategori hutan, alm. HENGKY MASIE dan ALM. RENI MASIE sekeluarga sudah memiliki lahan/kebun dan tinggal di di kebun tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada tahun 1986 lahan kebun milik alm. RENI MESIE di jual kepada korban sdr. LA ODE HAJI HARU dan dibuatkan surat jual beli, kemudian kebun milik HENGKY MASIE di jual kepada sdr. LA TARO, yang mana posisi kedua tanah tersebut berdekatan;
- Bahwa benar terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU tidak memiliki lahan/kebun yang berbatasan dengan sdr.LA TARO dan sdr. LA ODE HAJI HARU;
- Bahwa saksi menjelaskan sdr. LA TARO pernah menyuruh saksi untuk berkebun di lahan/kebun milik sdr. LA TARO, namun saksi menolaknya dikarenakan kebun saksi masih banyak yang harus di urus, namun setelah terlapor sdr. LADAHARU selesai menikah dengan anak saksi pada tahun 1991, dan di tahun 1992 saksi menyuruh anak menantunya sebagai terlapor sdr. LA DAHARU untuk berkebun menanam cengkeh di lokasi kebun milik sdr. LA TARO dan nanti hasilnya di bagi dua dengan pemilik kebun sdr. LATARO;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa status tanah milik sdr. LA TARO sampai dengan saat ini masih tetap milik sdr. LA TARO dan tidak pernah di

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual kepada siapa pun, yang saat ini lahan tersebut di kelola oleh terlapor sdr. LA DAHARU;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengenai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh Nomor: 593.3./02-2016 a.n. LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID, di lembar pertama saksi pernah lihat dan pernah tanda tangan, namun untuk lembar ke 2 (dua) saksi tidak pernah lihat dan tidak pernah menandatangani;
- Bahwa menurut keterangan saksi RUSDI HASAN, SH. MH (Kabag Hukum Kab. Halsel penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa-desa berkaitan dengan tanah di Kab. Halsel mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran, sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran;
- Bahwa penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa-desa di Kab. Halmahera Selatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran, sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran dengan penomoran sesuai dengan Peraturan ini adalah kodifikasi surat nomor 140 tentang pemerintahan Desa dan nomor sesuai dengan tujuan surat/kodifikasi tentang tanah di Desa dengan Kode Nomor 593.2 dan Kode Nomor 593.3;
- Bahwa penomoran surat secara umum yang benar untuk Desa di Kab. Halmahera Selatan menurut peraturan ini adalah Kodifikasi Surat nomor 593 tentang Pengurusan Hak-hak Tanah, Kodifikasi Surat nomor 2 tentang Hak Milik, Kodifikasi Surat nomor 3 tentang Hak Pakai, Kodifikasi surat 140 tentang pemerintahan Desa;
- Bahwa nomor urut surat berdasarkan nomor Agenda dari Desa;
- Bahwa contoh surat Desa Soasangaji Kec Obi Barat Kab. Halsel tentang hak milik tanah dan Hak Pakai tanah yaitu Nomor: 593.2 /140 / 02 / Desa Soasangaji tentang Hak Milik Tanah atau Nomor : 593.3 /140 / 02/ Desa Soasangaji tentang Hak Pakai Tanah;

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri nomor 135 tahun 2017 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah terdapat pada lampiran-lampiran pejabat kepala desa Tidak berhak menerbitkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02/Desa Soasangaji, tanggal 26 April 2016 karena surat ini harus dibuat oleh PPAT tingkat kecamatan dimana kenapa Pejabat kepala desa tidak bisa mengeluarkan surat ini karena surat menimbulkan hak atau menimbulkan peristiwa hukum;
- Bahwa Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 April 2016, surat tanah ini TIDAK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan di lingkungan kementerian dalam Negeri terdapat pada lampiran-lampiran;
- Bahwa mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh sesuai Kaidah penomoran yang benar atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri adalah Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/ 140 / 02 / Desa Soasabgaji, tanggal 26 April 2016 dan untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan atau kebun yang di keluarkan oleh Pjs Kepala desa Soasangaji WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah cacat secara administratif karena bertentangan dengan pedoman umum tata naskah dinas dan telah melampaui kewenangan Kepala Desa yang seharusnya dia mengeluarkan surat Berupa Surat Keterangan tanah, Bukan kepemilikan Hak;
- Bahwa menurut keterangan Sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd.S.D. (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016) Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016 a.n hak milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID dan yang konsep surat ini adalah adik saksi bernama LAODE SUDARMONO di rumah saya di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel tanggal 26 Mei 2016;
- Bahwa saat konsep surat atau pembuatan surat tersebut saat itu yang ada di rumah saksi antara lain sdr LA ODE BADARUDIN (ayah kandung

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya saat ini Desa Kawasi Kec. Obi) dan sdr LAODE SUDARMONO, sementara LA ODE MAPUTI dan LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID Alias LA DAHARU hanya menitipkan KTP nya ke LA ODE SUDARMONO karena mereka di Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halsel;

- Bahwa Saksi menjelaskan Bahwa Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 Mei 2016, pemberian Tanah nomor surat ini Saksi yang berikan sesuai nomor urut surat yang Saksi berikan (tercatat di buku agenda buku surat keluar Desa Soasangaji namun saat ini buku tersebut sudah saksi bakar);

- Bahwa Saksi menjelaskan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016, tanggal 26 Mei 2016, untuk tanda tangan surat tersebut Saksi yang pertama kali setelah itu sdr LAODE SUDARMONO kemudian LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID yang tanda tangan sementara untuk ditanda tangani oleh LA ODE MAPUTI di bawah ke Desa sama sdr LA ODE SUDARMONO untuk dia tanda tangan;

- Bahwa berdasarkan surat keputusan dari Bupati Halmahera Selatan Nomor: 97 tahun 2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 (sepuluh) Desa pada 7 (tujuh) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan SK ini saudara WA ODE YUSNA KAIMUDIN di tunjuk selaku Pjs. Kepala Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab. Halmahera Selatan;

- Bahwa menurut keterangan Sdr. LA ODE SUDARMONO Alias MONO menjelaskan bahwa terlapor mengakui kalau kuitansi pembelian dan papan pemberitahuan bahwa lokasi kebun tersebut adalah miliknya, namun itu atas suruhan dari terlapor sdr. LA DAHARU;

- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa lokasi kebun yang menjadi sengketa adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat kepemilikan jual beli tertanggal 08 Oktober 1986, karena pada saat itu paman Saksi sendiri yang membuat surat jual beli tersebut selaku kepala dusun a.n. Alm. LA ODE SEHE;

- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini yang menguasai lahan kebun milik korban adalah sdr. LA DAHARU, bukan dia. Dan terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO juga menjelaskan bahwa surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh tertanggal 1 Agustus 2016 Yang Kedua Terlapor Gunakan bukan terlapor yang buat, yang buat

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut adalah SURIANA ODE PIKA, dan terlapor mendapat surat tersebut dari terlapor LA DAHARU;

- Bahwa terlapor menjelaskan bahwa terlapor sdr. LA ODE SUDARMONO bersama terlapor LA DAHARU, dan bapa mertua sdr. LA DAHARU a.n. LA ODE MAPUTI datang mengukur di lokasi lahan/kebun yang menjadi sengketa, setelah itu terlapor LA ODE SUDARMONO datang meminta kepada PSJ kepala Desa a.n. WA ODE YUSNA KAIMUDIN yang bertempat di kantor Desa Soasangaji untuk membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016;

- Bahwa saat dimintai keterangan terlapor LA ODE SUDARMONO menjelaskan bahwa kedua surat yang terlapor telah gunakan yaitu: surat Keterangan Kepemilikan Lahan Kebun Cengkeh tertanggal 1 Agustus 2016 dan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016 tidak sah di mata hukum karena pada saat pembuat surat tersebut tidak sesuai dengan prosedur, dan tidak ada surat jual beli;

- Bahwa menurut keterangan sdr., LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID Alias LA DAHARU Menjelaskan bahwa awalnya lahan/kebun tersebut di garap oleh mertua saya sdr. LA ODE MAPUTI dan lahan/kebun tersebut di tinggal lama sehingga pada tahun 1992 telah menjadi hutan lalu saya membersihkan dengan tujuan untuk saya tanami cengkih dan coklat kemudian pada tahun 1994 sdr. LATARO ke Soa Sangaji yang saat itu berstatus masih dusun, lalu menanyakan kepada saya bahwa siapa yang membersihkan lahan/kebun, lalu saya mengatakan saya yang membersihkan lahan/kebun itu alasannya karena saya disuruh oleh mertua sdr. LA ODE MAPUTI karena dia tua dan tidak bisa bekerja lagi, kemudian lahan/kebun tersebut saya oleh hingga sekarang;

- Bahwa lahan/kebun tersebut belum ada surat-surat (bukti kepemilikan) dan nantinya pada tahun 2016 barulah saya memiliki surat berupa Surat keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) yang di keluarkan Pejabat sementara kepala Desa Sangaji atas nama WA ODE YUSNA dengan nomor surat: 593.3/02.2016, tanggal 26 Mei 2016, dan terlapor tidak tahu dimana proses pembuatan surat keterangan tanah tersebut;

- Bahwa benar Surat keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soasangaji sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan nomor surat : 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya suruh sdr. LA ODE SUDARMONO untuk membuat sebagai bukti kepemilikan milik terlapor LA DAHARU;

- Bahwa kami telah berulang-ulang kali di panggil di Desa Soasangaji dari tahun 2016 untuk di mediasi, yakni semenjak sdr LA MUSDI menjabat kepala desa Soasangaji dan sdr SURIANA ODE PIKA menjabat Sekretaris, kemudian pada tahun 2021 kembali di undang untuk mediasi oleh kepala Desa sdr LA JATI HI. ARSAD, selain di desa kami juga di mediasi pada tingkat kecamatan dan juga pada tingkat Polsek Obi;
- Bahwa selama di mediasi dari tahun 2016 sampai dengan saat ini baik tingkat desa sampai di kecamatan tidak hasil kesepakatan dan saya bersih keras lahan/kebun itu milik saya;
- Bahwa surat keterangan Hak kepemilikan lahan kebun Cengkeh yang diduga palsu;
- Bahwa berdasarkan fakta pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dianalisis fakta hukum yang disampaikan oleh pemeriksa/penyidik yang kemudian dapat dikemukakan bahwa berdasarkan kronologis kasus dan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti atau bukti surat sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa berdasarkan fakta hukum pemeriksaan ditingkat penyidikan perbuatan saudari WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd.SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), untuk meminta pertanggungjawaban pidana karena perbuatan WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd. telah mengetahui dan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/02-2016 a.n hak milik LA ODE BAHARUDIN ODE MAJID dan yang konsep surat ini Sdr. LAODE SUDARMONO di rumah WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd. SD di Desa Gandasuli Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel tanggal 26 Mei 2016. Hal ini menunjukkan bahwa Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd. telah membuat surat palsu yakni surat keterangan tanah, yang seolah-olah benar, pada hal surat tersebut dikeluarkan tidak didukung dengan data atas nama LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID. perbuatan WA ODE KAIMUDIN telah memenuhi unsur sebagaimana Oleh karena itu dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan pasal 421 KUHPidana. Sedangkan Perbuatan Sdr. LA ODE SUDARMONO, dan LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1 KUHPidana dan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, karena

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, hal ini berdasarkan keterangan Sdr. LA ODE BAHARUDIN bahwa benar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soasangaji sdr WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan Nomor Surat: 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya suruh sdr. LA ODE SUDARMONO kepemilikan milik terlapor LA DAHARU. Oleh karena itu keduanya telah untuk membuat sebagai bukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa selain itu dapat dijelaskan bahwa Pasal 55 KUHPidana merupakan perluasan dari pertanggungjawaban pidana bukan perbuatan pidana. Oleh karena itu dalam kasus ini pelakunya lebih dari satu sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 KUHP dapat dijumlahkan dalam kasus ini akan tetapi perbuatan pidana pokoknya yakni Pasal 263 Ayat (1) (2) dan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

- Bahwa sesuai fakta hukum yang disampaikan Penyidik/Pemeriksa dalam perkara incasu, perkara ini menunjukkan bahwa perbuatan saudara WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd.SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), sdr.LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID sebagaimana dijelaskan di atas, memenuhi ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana, atau pasal 263 ayat (1) ayat (2) KUHPidana, atau Pasal 421 KUHPidana,jo pasal 55 KUHPidana;

- Bahwa unsur-unsur tersebut sesuai dalam pasal hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut Unsur obyektif, meliputi Barang siapa; mengandung arti Setiap orang (baik itu orang perorangan/*persoonlijk* ataupun suatu badan usaha/badan hukum yang disebut dengan *rechtspersoon*) yang diembani hak dan kewajiban menurut hukum, yaitu yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Dari rumusan ini, menunjukkan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, karena Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN,S.Pd., Sdr. LA ODE SUDARMONO dan Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, merupakan subyek hukum orang perorangan yang telah dewasa dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan karena terpenuhi kejiwaannya;

- Bahwa unsur Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, mengandung arti memasukkan keterangan yang diberikan seseorang kepada Pegawai Umum, dimana isi dari keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau dengan kata lain

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut adalah bohong atau palsu. Dimana keterangan yang palsu tersebut dimasukkan ke dalam Akta yang harus dibuat oleh Pegawai tersebut, dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan akta itu seolah-olah keterangan yang termuat di dalamnya itu Sdr saksi benar. Dari rumusan unsur ini, dihubungkan dengan kesaksian NAZARUDDINHI ISMAIL menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 korban LA ODE HAJI HARU mengadu ke saksi sebagai Camat Obi Barat terkait lahan kebunnya yang di garap oleh terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN Alias LA DAHARU, dan di saat korban LA ODE HAJI HARU mengadu kepada saksi korban melampirkan surat jual beli tertanggal 8 Oktober 1986 miliknya, dengan lokasi kebun di Desa Soa sangaji Kec. Obi Barat Kab. Hal-Sel dan adanya surat/berita acara keputusan No.235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Soasangaji a.n. LA JATI HAJI ARSAD. Kemudian saksi melakukan mediasi antara kedua bela pihak dan dari hasil mediasi tersebut, dibuatkanlah 2 (dua) lembar foto Surat Keputusan Penghentian nomor : 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021, yang ditandatangani Camat Obi Barat, dengan hasil mediasi bahwa lahan kebun tersebut adalah korban milik sdr. LA ODE HAJI HARU, dengan surat tersebut saksi beserta dengan staf Desa, babinsa, melakukan pengukuran di lokasi berdasarkan surat jual beli dan berita acara dari Desa, dan dengan hasil pengukuran tersebut bahwa lahan tersebut adalah milik korban sdr. LA ODE HAJI HARU berdasarkan surat jual beli tahun 1986, dan berita Acara dari tingkat Desa, bukan milik terlapor sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, serta keterangan saksi-saksi lain sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan bahwa tanah/lahan tersebut dengan alas hak surat jual beli merupakan milik sah Sdr. LA ODE HAJI HARU. Oleh karena Surat keterangan Tanah (SKT) yang di keluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Soasangaji sdri WA ODE YUSNA KAIMUDIN dengan nomor surat: 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, tersebut yang saya LA ODE BAHARUDIN ALIAS LA DAHARU yang menyuruh untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama LA ODE BAHARUDDIN ALIAS LA ODE MADJID, sehingga unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik telah terpenuhi terhadap perbuatan "LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, dan LA SUDARMOONO

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur subyektif, meliputi Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian; mengandung arti bahwa adanya kehendak/pengetahuan untuk "menyuruh melakukan" seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP, dimana orang yang disuruh melakukan itu melakukan perbuatan seperti yang dikehendaki oleh yang menyuruh untuk mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut. Dari rumusan ini menunjukkan bahwa Terlapor Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN, S.Pd. SD (mantan PJS. Kepala Desa tahun 2016), Sdr.LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID telah memiliki maksud/kehendak untuk memakai dan menyuruh orang lain Surat Keterangan tanah (SKT) tersebut seolah-olah memiliki kebenaran, hal mana penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian pada Sdr. LA ODE HAJI HARU. Oleh karena itu unsur dengan maksud telah terpenuhi;
- Bahwa unsur Pasal 263 KUHPidana adalah Unsur-unsur hukum yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2);
- Bahwa KUHP tersebut dapat diuraikan dan dijelaskan, sebagai berikut:  
Di dalam tindak pidana "pemalsuan surat" terdapat 2 (dua) kualifikasi tindakan, yakni "membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*)" dan "memalsukan surat (*vervalsen*)". Tindak pidana "membuat surat palsu membuat surat baru yang (*valschelijk opmaaken*)", maknanya asli atau seolah-olah sebelumnya tidak ada, yang seolah-olah mengandung nilai kebenaran atau keaslian, baik bentuk maupun isinya, "memalsukan surat (*vervalsen*)", maknanya sedangkan tindakan sebelumnya telah ada surat yang asli, dan surat asli dimaksud diubah bentuk maupun substansinya yang seolah-olah asli dan benar adanya, seperti tindakan menambah, mengurangi atau mencoret isi dari surat yang asli. Dari rumusan Pasal ini dihubungkan dengan fakta pemeriksaan di tingkat penyidik sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah dengan Nomor 593.3.02.2016, tanggal 26 Mei 2016, yang tanpa didukung dokumen yang sah, yang seolah-olah asli atau mengandung kebenaran. Oleh karena itu perbuatan "WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah memenuhi unsur membuat "surat palsu";

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



- Bahwa Surat yang dipalsukan dan digunakan tersebut mengandung esensi, bahwa surat yang dipalsukan dan digunakan dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.- Tindakan yang dilarang (delik formil) menurut pasal 263 KUHP, adalah tindakan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) atau memalsukan surat (*vervalsen*) yang seolah-olah asli atau benar adanya;
- Bahwa kebenaran yang dimaksud meliputi kewenangan membuat, substansi surat, dan prosedur pembuatan. Kewenangan membuat, artinya legalitas dan legitimasi tindakan yang dilakukan menurut aturan hukum yang ada substansi surat, meliputi: bentuk (form) surat, isi surat dan identitas pembuat; sedangkan prosedur pembuatan, meliputi: tata urut atau mekanisme pembuatan surat;
- Bahwa dari rumusan unsur ini jika dihubungkan dengan kronologi kejadian dan fakta keterangan pemeriksaan saksi-saksi menunjukkan bahwa Sdr. LAODE BAHARUDDIN ODE MADJID dan Sdr. LA ODE SUDARMONO, telah menggunakan surat palsu tersebut dan digunakan yang menimbulkan suatu hak atau diperuntukkan sebagai suatu bukti dari suatu hal. Oleh karena itu perbuatan Sdr. LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONO telah terpenuhi unsur ini;
- Bahwa hakikat tindakan memalsu, adalah segala bentuk perbuatan/tindakan yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, menambah, mengubah atau mengganti substansi atau salah satu isinya surat sehingga berbeda atau berubah dengan surat aslinya. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Bentuk tindakan/perbuatan dan surat tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, maksudnya dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP, di mana harus dibuktikan salah satu bentuk tindakan/perbuatannya dan salah satu objek surat yang dipalsukan; unsur ini tidak perlu dibuktikan karena dalam perkara ini adalah perbuatan "membuat surat palsu" dan "menggunakan surat palsu";
- Bahwa akibat yang dilarang (delik materiil) dalam pasal 263 KUHP, adalah timbulnya kerugian atas pemakaian/penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut; Bahwa dalam perkara ini Sdr. LA ODE HAJI HARU Selaku Pelapor telah mengalami kerugian atas pemakaian/penggunaan surat keterangan tanah palsu yang telah diterbitkan oleh Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDDIN, dan telah



digunakannya surat palsu tersebut oleh LA ODE BAHARUDDIN DAN LA ODE SUDARMOONO;

- Bahwa unsur yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung dua unsur, yakni unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif, adalah unsur yang berada di luar diri pelaku, dan unsur subyektif, adalah unsur yang melekat pada diri pelaku.

- Bahwa unsur obyektif meliputi Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dan dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

- Bahwa unsur subyektif, meliputi dengan maksud dan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai yang seolah-olah benar seperti surat asli atau tidak palsu;

- Bahwa unsur-unsur rumusan pasalnya, sebagai berikut unsur "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat", artinya suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar adanya dan tidak palsu. Perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat berupa Perbuatan membuat surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenarannya, perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai pemalsuan intelektual (*intelectuele valsheid*), Perbuatan membuat surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi perbuatan pemalsuan materiil (*materiele valsheid*), Perbuatan membuat surat palsu, di mana sebelum perbuatan dilakukan, tidak ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi surat palsu atau surat tidak asli, Memalsu surat, artinya sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada sebuah surat, yakni surat yang asli, kemudian pada surat yang asli tersebut isinya, tandatangan si pembuat atau nama si pembuat surat asli dipalsukan, akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar dan bertentangan dengan kebenarannya atau palsu. Perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan memalsukan surat. Unsur *a quo*, adalah sebagai unsur obyektif dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum (*delict formil*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur "dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, tafsirannya, bahwa dari dibuatnya surat palsu atau dipalsukannya surat, berakibat dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau dibuatnya surat palsu atau yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Akibat dimaksud dilarang oleh hukum (*delict materiil*);
- Bahwa unsur "seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", mengandung pengertian, bahwa surat yang dibuat atau surat yang dipalsukan *a quo*, dianggap atau diakui sebagai sesuatu yang benar adanya, sedangkan tidak benar adanya, artinya surat palsu dan yang dipalsukan *aquo* sesuai kebenarannya, namun dianggap benar adanya;
- Bahwa unsur "dengan maksud" (*met het van oogmerk*). Penafsirannya, bahwa suatu perbuatan dilakukan diliputi maksud (*oogmerk*) untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai atas surat yang dipalsukan tersebut, artinya memakai atau menyuruh orang memakai sebagai maksud dan perbuatan dimaksud dilakukan secara sadar dan mengerti bahwa surat dimaksud tidak benar adanya atau palsu;
- Bahwa unsur "dapat menimbulkan kerugian", mengandung makna, bahwa atas pemakaian surat palsu *a quo* dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun imateriel. Dengan demikian jika surat palsu dimaksud dibuat namun tidak digunakan atau tidak diperuntukkan, sehingga tidak menimbulkan kerugian, maka perbuatan *a quo* tidak diancam pidana penjara karena pemalsuan surat;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ketentuan unsur yang terkandung dalam Pasal 266 ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1), ayat (2) atau Pasal 421 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ketika unsur yang terumuskan dalam Pasal yang dimaksud sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa perbuatan mantan Psj. Kepala Desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kab Hal-sel atas nama WA ODE YUSNA KAIMUDIN dapat di jerat dengan Pasal 266 ayat (1) atau pasal 263 ayat atau pasal 421 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan Pjs. Kepala desa Soasangaji Kec. Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan atas nama WA ODE YUSNA KAIMUDIN, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana, oleh karena itu kepada Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN diterapkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP. Sedangkan unsur Pasal 266 KUHP, unsur "menyuruh memalsukan surat" terpenuhi;

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara LA ODE SUDARMONO dan saudara LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID, membuat dan menggunakan surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3 /02-2016 tanggal 26 Mei 2016, dapat di jerat dengan Pasal 266 ayat (1), atau pasal 263 ayat (1), ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1KUHPidana. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONO, telah memasukkan keterangan palsu dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan menggunakan Surat Palsu tersebut, sehingga kepada kedua terlapor tersebut telah melanggar dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 (1) dan Ayat (2) KUHPidana;
- Bahwa dalam kepemilikan tanah tersebut yang dimiliki oleh korban adalah surat jual beli tahun 1986, dan di tahun 2016 terlapor LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan terlapor LA ODE SUDARMONO membuat surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh dengan nomor surat: 593.3 / 02-2016 tanggal 26 Mei 2016 yang mengetahui Pjs. Kepala Desa Soasangaji sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN untuk menguasai lahan kebun milik korban;
- Bahwa Kabag Hukum Pemda Hal-Sel menjelaskan bahwa Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.3/022016, tanggal 26 April 2016, surat tanah ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri terdapat pada lampiran-lampiran. Mengenai penomoran Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh sesuai Kaidah penomoran yang benar atau sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2012 tentang tata kearsipan dilingkungan kementerian dalam Negeri adalah Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor 593.2/140/02/Desa Soasangaji, tanggal 26 April 2016;
- Bahwa untuk surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan atau kebun yang di dikeluarkan oleh Pjs Kepala desa Soasangaji WA ODE YUSNA KAIMUDIN adalah cacat secara administratif karena bertentangan dengan pedoman umum tata naskah dinas dan telah melampaui kewenangan Kepala Desa yang seharusnya dia mengeluarkan surat Berupa Surat Keterangan tanah, Bukan kepemilikan Hak;

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat ahli telah dijelaskan di atas bahwa perbuatan Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu Sdr. WA ODE YUSNA KAIMUDIN jerat dengan ketentuan Pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana. Sedangkan Perbuatan LA ODE SUDARMONO, dan LA ODE BAHARUDDIN ODE MADJID, telah melanggar Pasal 266 KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2). Oleh karena itu kepada kedua terlapor dapat dijerat dengan Pasal 266 Ayat (1) dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka kepada Sdri. WA ODE YUSNA KAIMUDIN dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pasal 421 KUHPidana, karena perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka kepada Sdr. LA ODE BAHARUDIN ODE MADJID dan LA ODE SUDARMONNO dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (2) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHPidana, karena perbuatannya telah memenuhi unsur pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- Bahwa Ahli jelaskan penjelasan cukup;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan tersebut di atas semuanya sudah benar dan tidak akan mengubahnya lagi serta Ahli bersedia disumpah dan bersedia mempertanggung jawabkannya di sidang pengadilan Negeri;
- Bahwa Semua keterangan atau pendapat Ahli yang Ahli sampaikan semuanya sudah benar sesuai dengan konsep, keilmuan hukum dan pengetahuan hukum pidana yang Ahli miliki, dan selama pemeriksaan ini Ahli tidak merasa dipaksa oleh pemeriksa/penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait perkara penerbitan surat keterangan tanah;
- Bahwa surat keterangan tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah surat keterangan tanah yang ada di Desa Soasangaji namun dibuat di Desa Gandasuli;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat keterangan tanah adalah Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) sebagai pejabat sementara kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa surat keterangan tanah tersebut ditujukan kepada pemilik yaitu Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang menerangkan tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan namun Terdakwa tidak mengetahui luas tanah secara pasti;
- Bahwa surat keterangan tanah terbit tanggal 26 Mei tahun 2016 dimana Terdakwa terlibat dalam pembuatan surat keterangan;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) saat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) datang ke kantor desa Gandasuli dan bermohon secara lisan namun tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa karena permohonan harus secara resmi beserta syarat-syaratnya tidak bisa secara lisan;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) kemudian mengajak Terdakwa bertemu untuk meminta tolong menunjukkan alamat kepala desa guna Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mengurus surat keterangan tanah kembali;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) meminta tolong kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung dari kepala Desa yaitu Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah);
- Bahwa saat mengantarkan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) ke rumah Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah), Terdakwa menyampaikan jika niatan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) datang untuk mengurus surat keterangan tanah miliknya yang selama ini sudah dimiliki dan diolah namun belum ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) kemudian menyampaikan jika harus membuat permohonan dan mengukur panjang serta lebar tanah baru diberikan kepada Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) karena jika belum Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) tidak bisa membuat surat keterangan;
- Bahwa karena Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) belum mempersiapkan syarat-syarat maka kemudian pulang;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2016 atas perintah dari Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) bertemu dengan Saksi La Ode Baharudin

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa terpisah) lalu bertanya terkait perkembangan surat keterangan tanah;

- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) kemudian menjawab jika pada tanggal 24 Mei 2016 harus naik ke kebun untuk mengukur dan melihat tapal-tapal batas agar jelas;
- Bahwa Saksi La Ode Maputi juga ikut ke rumah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) untuk melakukan pengukuran lahan;
- Bahwa Saksi La Ode Maputi jabatannya sebagai kepala urusan di Desa Soasangaji sehingga ikut dalam pengukuran;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ditemukan panjang 110 meter, lebar utara 31 meter, selatan 47 meter;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran kemudian Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) meminta Terdakwa untuk menggambar sketsa lahan berdasarkan hasil pengukuran;
- Bahwa setelah selesai mengukur lalu Terdakwa bersama dengan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) menulis surat permohonan dan dibaca ulang oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa surat permohonan tersebut pada tanggal 25 Mei 2016 dibawa oleh Terdakwa ke Bacan untuk diberikan kepada Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah);
- Bahwa kemudian Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) langsung mengetik surat keterangan tanah dan memberikan kepada Terdakwa sebanyak 1 lembar;
- Bahwa surat yang dibuat oleh Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) baru ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) dan sudah di stempel atas nama Kepala Desa Soasangaji;
- Bahwa Terdakwa memberikan surat keterangan tanah pada tanggal 28 Mei 2016 kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) di rumah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dengan meminta Saksi La Ode Maputi untuk datang menandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi La Ode Maputi ikut menandatangani jabatannya sebagai kepala urusan adat desa Soasangaji;
- Bahwa saudara La Ode Badarrudin ikut menandatangani jabatannya sebagai kepala urusan pemerintahan desa Soasangaji;

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan surat keterangan tanah kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah), Terdakwa kemudian kembali ke Bacan;
- Bahwa selama mediasi-mediasi dilakukan Terdakwa tidak pernah ikut dan tidak diundang;
- Bahwa tanah tersebut sempat dijaminkan oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) karena Terdakwa sebelumnya pernah meminjamkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) pada tahun 2013;
- Bahwa saat awal peminjaman uang Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut tidak beranak dan tidak berbunga serta Terdakwa tidak meminta jaminan karena asas kepercayaan;
- Bahwa tanah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dijaminkan kepada Terdakwa pada tahun 2019;
- Bahwa terkait kuitansi pemberian sejumlah uang pada tahun 2016 oleh Terdakwa kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) kemungkinan salah tulis karena terburu-buru;
- Bahwa Terdakwa lupa penjaminan tanah oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tahun berapa;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) melunasi uang Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada masalah antara Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan Saksi Korban La Ode Haji Haru pada tahun 2021;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menjelaskan bahwa Terdakwa sudah lama mengikuti perkara antara Saksi Korban La Ode Haji Haru dengan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) sehingga Terdakwa berkonsultasi ke Pengadilan Negeri Labuha dan diketahui untuk membuat gugatan harus setidaknya ada surat keterangan tanah sehingga Terdakwa berniat membuat surat keterangan tanah tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menjelaskan bahwa jual beli tanah yang dibuat pada tahun 1986 oleh Paman Terdakwa yaitu saudara La Ode Sehe selaku kepala dusun jika lahan tersebut adalah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru adalah benar tapi memang sebenarnya ada 2 objek lahan yang bersebelahan, karena objek 1-nya adalah lahan yang diolah oleh Terdakwa dan Ayah Terdakwa;

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



- Bahwa Saksi Korban La Ode Haji Haru membeli tanah dari saudara Reni Mesie pada tahun 1986 dimana Terdakwa tahu dari Paman Terdakwa pada tahun 1991;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menjelaskan bahwa Terdakwa ikut serta dalam pembuatan surat keterangan tanah di rumah Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) adalah salah karena Terdakwa hanya berperan dalam mengukur dan menggambarkan sketsa tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kemampuan khusus dalam mengukur tanah untuk surat keterangan tanah;
- Bahwa isi dalam permohonan surat keterangan yang Terdakwa buat sebagai fungsi hak pakai namun Terdakwa tidak tahu mengapa dalam surat keterangan yang diterbitkan isinya hak milik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait surat keterangan tanah kenapa hanya dibuat dalam 1 lembar tidak ada arsipnya;
- Bahwa pemilik lahan di sekitar tanah sengketa sekaligus saksi tapal batas tidak ada dalam surat keterangan karena tidak ada di sekitar lahan sekaligus tidak mengakui bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) adalah pemilik sah lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah membantu dalam membuat surat keterangan tanah;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Terdakwa membantu Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) karena Terdakwa pernah meminjamkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengelola tanah maupun lahan milik Saksi La Ode Baharuddin (terdakwa terpisah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. La Ode Saomu Wali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang diambil oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah yang menjadi sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru melihat surat kepemilikan tanah saat ada masalah di persidangan dan diperlihatkan oleh saudara Hamka anak dari Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut letaknya di pinggir jalan yang biasa dilalui warga saat ke kebun dan dijadikan jalan pintas;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) memiliki dan merintis tanah tersebut pada tahun 1993 dengan menanam cengkeh bersama dengan teman Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yaitu saudara La Ode Sarmin;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji sejak tahun 1990 sampai tahun 2019 dan sekarang berdomisili di Desa Laiwui;
- Bahwa Saksi hanya pernah lewat satu kali di tanah sengketa yaitu saat memeriksa untuk membeli tanah kebun dan juga ada program pembuatan bak air;
- Bahwa cara pengukuran tanah saat itu menggunakan sistem depa (hasta) tapi Saksi tidak tahu mengukurnya menggunakan tangan penjual atau pembeli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudari Renie Mesie, saudara La Ode Ratno dan Saksi La Asli ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai hukum adat saat membuka lahan, tapi dahulu cara mendapatkan tanah dengan membuka hutan dan menebang pohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait mediasi di kantor desa mengenai permasalahan tanah antara Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai papan pemberitahuan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tidak pernah memperlihatkan secara langsung surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa program pembuatan bak air bersih saat itu akan dibuat pipa saluran yang jalurnya melewati tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa yang menjabat sebagai kepala Desa Soasangaji saat itu adalah saudara La Muslim;

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) berkebun dan menanam cengkeh di tanah yang menjadi sengketa tersebut tidak ada masalah;
- Bahwa saat melewati tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah), Saksi pernah melihat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) sedang menanam cengkeh;
- Bahwa sekitar tahun 2016 pernah ada rapat musyawarah bersama warga di kantor desa membahas mengenai pembuatan dan pemasangan pipa air yang melewati tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan Saksi ikut menghadiri sebagai pendamping desa;
- Bahwa tidak ada warga yang menentang pembuatan dan pemasangan pipa air;
- Bahwa Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mengizinkan pembuatan dan pemasangan pipa air di area tanah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa saat rapat musyawarah tersebut Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak sedang berada di Desa Soasangaji;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu pada tahun 2016 yang menjabat sebagai kepala desa Soasangaji adalah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) dan tahun 2015 kepala desa yaitu Saudara La Muslim;

## 2. **La Ode Abduna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan masalah tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang di ambil oleh Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) karena saat itu Saksi mengelola tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru tahun 1998;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Soasangaji, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa dulunya Saksi Korban La Ode Haji Haru tidak berada di Desa Soasangaji dan tanah tersebut dititipkan ke saudara ipar Saksi Korban La Ode Haji Haru yaitu saudara La Ode Mantara dan Saksi diberikan ijin

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam singkong selama dua tahun dari tahun 1998 sampai 2000;

- Bahwa Saksi tidak tahu lebar dan panjang tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Saksi Korban La Ode Haji Haru mendapatkan tanah;
- Bahwa cara pengukuran tanah pada waktu itu menggunakan sistem depa (hasta) tapi Saksi tidak tahu ukurnya menggunakan tangan penjual atau pembeli;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Soasangaji sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saudara Reni Mesie, saudara La Ratno dan Saksi La Asli;
- Bahwa terkait batas tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru, Saksi hanya mengetahui batas sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik orang lain di sekitar tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru dan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai mediasi di kantor desa tentang sengketa tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program desa di Soasangaji pada tahun 2016 yaitu terkait air bersih;
- Bahwa saat Saksi menanam singkong di tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru, tidak ada tanaman lain hanya kayu yang tumbuh liar;
- Bahwa posisi tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru dan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) bersebelahan;
- Bahwa saat Saksi mengelola tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru pada saat itu Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) sudah mengelola tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) melakukan aktivitas di tanah Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dengan menanam pohon cengkeh;
- Bahwa Saksi sering lewat di tanah milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan masih terlihat tanaman cengkeh dengan kondisi ada yang sudah besar dan masih kecil;

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa Saksi mengelola tanah Saksi Korban La Ode Haji Haru dengan ukuran 20 (dua puluh) depa (hasta);
- Bahwa Saksi hanya menanam singkong dan tidak diizinkan menanam yang lain di tanah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
2. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;
3. 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;
4. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016;
5. 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
6. Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada bulan Mei tahun 2016 di rumah Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) yang beralamat di Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Terdakwa La Ode Sudarmono alias Mono telah membuat surat keterangan tanah atas nama Saksi La Ode Baharudin Madjid alias La Daharu (terdakwa terpisah);
- Bahwa benar, surat atas nama Saksi La Ode Baharudin Madjid tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Desa Soasangaji dalam bentuk Surat

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02-2016 tertanggal 26 Mei 2016 yang distempel dan ditandatangani oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Soasangaji yaitu Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);

- Bahwa benar, berawal Saksi Korban La Ode Haji Haru yang memperoleh hak atas sebidang tanah pada tahun 1986 berdasarkan dokumen surat jual beli tertanggal 08 Oktober tahun 1986 yang dibeli dari saudara Reni Mesie kemudian Saksi Korban La Ode Haji Haru kembali pulang ke Buton pada tahun 1990 dan baru kembali ke Pulau Bacan pada tahun 2014;
- Bahwa benar, selama jangka waktu Saksi Korban La Ode Haji Haru meninggalkan Pulau Bacan, Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) sudah mulai mengolah dan menggarap lahan tersebut dengan menanam tanaman berupa cengkeh, padi, dan jagung tanpa sepengetahuan Saksi Korban La Ode Haji Haru sehingga menimbulkan sengketa antara Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dengan Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa benar, berdasarkan mediasi-mediasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, 2016, dan 2021 yang difasilitasi baik oleh Pemerintah Desa Soasangaji maupun Pemerintah Kecamatan Obi Barat dengan hasil mediasi lahan tersebut adalah milik Saksi Korban La Ode Haji Haru namun Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) tetap bersikukuh dan tidak mau mengembalikan tanah tersebut kepada Saksi Korban La Ode Haji Haru;
- Bahwa benar, pada bulan April tahun 2016 Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang berniat membuat dokumen surat keterangan tanah sengketa datang ke Kantor Desa Gandasuli namun karena tidak cukup syarat sehingga Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) pulang;
- Bahwa benar, pada bulan Mei 2016 Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) berkomunikasi dengan Terdakwa yang merupakan saudara kandung Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) meminta tolong untuk dibantu dalam penerbitan surat keterangan tanah;
- Bahwa benar, Terdakwa atas arahan dari Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) kemudian membantu Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mempersiapkan syarat penerbitan surat keterangan berupa membuat surat permohonan, mengumpulkan berkas atau identitas pemohon, mengukur dan membuat sketsa tanah yang dimohonkan oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);

Halaman 85 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dua hari sebelum surat keterangan tanah tersebut terbit, Terdakwa La Ode Sudarmono membantu Saksi La Ode Baharudin untuk membuat surat pengukuran dan sketsa tanah yang dimohonkan untuk dibuatkan surat keterangan kepemilikan tanah;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam membuat surat pengukuran tanah dan sketsa yang nantinya dipergunakan sebagai dasar pembuatan surat keterangan tanah yang dimohonkan tersebut, tidak memasukkan saksi-saksi batas untuk menandatangani surat pengukuran dan sketsa tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memasukkan saksi-saksi batas dalam surat pengukuran dan sketsa dikarenakan saksi-saksi batas tidak mengakui apabila tanah tersebut adalah tanah milik Saksi La Ode Baharudin;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa membuat surat pengukuran dan sketsa tanah serta menerima berkas-berkas yang telah lengkap tersebut, Terdakwa selanjutnya membuat draf konsep surat keterangan tanah yang kemudian akan dipergunakan oleh Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin dalam pembuatan surat keterangan tanah;
- Bahwa benar, pada bulan Mei tahun 2016 semua syarat dan berkas surat keterangan tanah yang sudah jadi diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah);
- Bahwa berdasarkan draf konsep surat keterangan tanah yang sebelumnya sudah dibuat oleh Terdakwa, Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) kemudian mengetik dan mencetak Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) sampai kemudian surat keterangan tersebut dapat terbit;
- Bahwa benar, Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh Nomor: 593.3/02/2016 atas nama Terdakwa La Ode Baharudin Ode Madjid memiliki sistematika penomoran surat yang tidak sesuai dengan penomoran atau kode nomor pada surat-surat desa yang berkaitan dengan tanah di Kabupaten Halmahera Selatan yang mengacu kepada Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 135 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai lampiran-lampirannya;
- Bahwa benar, sempat terjadi pengalihan hak kepemilikan tanah yang menjadi obyek di dalam surat keterangan tanah tersebut kepada Terdakwa karena tanah tersebut sebelumnya pernah dijaminkan oleh Saksi La Ode

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



Baharudin (terdakwa terpisah) saat meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tahun 2016 dan baru dilunasi oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN TUNGGAL**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;
5. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

##### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini adalah menunjuk orang perseorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal budinya dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono adalah orang yang oleh penuntut



Umum telah diajukan ke persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam hal ini tidak ada error in persona;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohani, karena terdakwa selama persidangan ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dan benar dan dapat menjawab pertanyaan baik dari jaksa maupun hakim sehingga dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun Rohannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Sedangkan yang dimaksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa sepucuk surat dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan yang dimaksud perbuatan memalsu (*vervalsen*) adalah segala wujud perbuatan apa pun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana; hal 195-196);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dan Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) di rumah Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) beralamat Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera selatan pada bulan Mei 2016 telah membuat Surat Keterangan Tanah dengan Kop Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh, Nomor: 593.3/02/2016 tertanggal 26 Mei 2016 atas nama La Ode Baharudin Ode Madjid (terdakwa terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari Saksi Korban La Ode Haji Haru bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah hak kepemilikan Saksi Korban La Ode Haji Haru secara sah yang diperoleh dari jual beli pada tahun 1986 dari saudara Reni Mesie yang dibuktikan dengan Surat Jual Beli tanah tertanggal 08 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan apabila, dalam pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah tersebut didasarkan pada persyaratan yang sebelumnya sudah disiapkan dan dikumpulkan oleh Terdakwa yang salah satunya berupa surat pengukuran dan sketsa tanah;

Menimbang, bahwa surat pengukuran dan sketsa tanah tersebut dibuat oleh Terdakwa La Ode Sudarmono dua hari sebelum surat keterangan kepemilikan tanah tersebut terbit;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan surat pengukuran dan sketsa tanah tersebut, Terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan saksi-saksi batas karena saksi-saksi batas tidak mengakui apabila tanah tersebut adalah tanah milik Saksi La Ode Baharudin;

Menimbang, bahwa dengan tidak memasukkan saksi-saksi batas ke dalam surat pengukuran tersebut menunjukkan apabila sebenarnya Terdakwa tahu dan paham apabila tanah tersebut bukan tanah milik Saksi La Ode Baharudin atau setidaknya tanah tersebut masih dalam sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui apabila tanah tersebut masih dalam sengketa, Terdakwa tetap membuat surat pengukuran dan sketsa tanah kemudian dilanjutkan dengan membuat draf konsep surat keterangan kepemilikan tanah yang dipergunakan oleh Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin;

Bahwa rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan apabila Terdakwa La Ode Sudarmono secara nyata membuat surat palsu yang mana isi dari surat tersebut ialah bukan didasarkan pada hal yang sebenarnya;

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan pemalsuan surat keterangan hak kepemilikan tanah dan surat keterangan tersebut ternyata isinya tidak benar, maka Terdakwa telah terbukti membuat surat palsu, oleh karenanya unsur membuat surat palsu telah terbukti;

**Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yaitu dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau Pembebasan Hutang atau subunsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Jadi unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsu tersebut haruslah suatu surat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Surat tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
2. Surat tersebut dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;
3. Surat tersebut dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
4. Surat tersebut surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan surat 593.3/02-2016 yang dikonsep oleh Terdakwa La Ode Sudarmono berdasarkan surat ukur dan sketsa yang juga dibuat oleh Terdakwa yang isinya menerangkan bahwa Saksi La Ode Baharudin memiliki sebidang tanah di Desa Soasangaji dan kebun cengkeh sejak tanggal 2 Maret 1992, dimana tanah tersebut berbatasan sebelah utara dengan kebun La Ode Muli, Selatan dengan kebun La Ode Bolo, Timur berbatasan dengan La Ode Muli dan Barat dengan La Jiharu memiliki judul "SURAT KETERANGAN HAK KEPEMILIKAN SEBIDANG TANAH LAHAN KEBUN CENGKEH" dan dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Saksi La Ode Baharudin memiliki sebidang tanah dan kebun cengkeh 130 (seratus tiga puluh) pohon sejak dirabas hutan (ditebang), maka Majelis Hakim menilai apakah surat tersebut dapat



menerbitkan suatu hak, perikatan, pembebasan hutang atau memberikan keterangan terhadap suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan Ahli, di bawah sumpah, bernama Rury Irawan, SSiT, M.H, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara yang menerangkan bahwa hak atas tanah yang diakui oleh undang-undang pertanahan ada dua kategori besar hak perorangan dan hak badan hukum, yang hak perorangan berbentuk hak milik, sedangkan hak badan hukum bisa berbentuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun hak pakai dan hak pengelolaan, lebih lanjut Ahli menjelaskan bahwa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tidak menimbulkan hak namun apabila Surat Keterangan Tanah tersebut diajukan ke Badan Pertanahan Nasional, dapat menjadi suatu alas hak agar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut, Majelis Hakim sepakat dan berpendapat Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016 bukanlah surat yang menimbulkan hak namun demikian Majelis Hakim menilai surat keterangan tanah tersebut dapat digunakan untuk menerangkan suatu perbuatan yaitu penguasaan tanah yang dilakukan oleh Saksi La Ode Baharudin dan dalam pengakuannya Saksi La Ode Baharudin juga berencana untuk mengajukan surat keterangan tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk dapat dijadikan sebagai Sertifikat Hak Milik, sehingga Majelis Hakim menilai surat tersebut masuk kategori yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa agar seorang Terdakwa dapat dihukum menurut pasal ini, maka pada waktu membuat surat palsu atau memalsukan surat harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah-olah surat tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam surat keterangan tanah yang dibuat tidak ada saksi-saksi dari pemilik tapal batas ataupun tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa tersebut karena para pemilik yang bersebelahan tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) serta Terdakwa menyadari jika surat keterangan tanah yang terbit adalah surat hak kepemilikan bukan surat hak pakai sesuai dengan permohonan yang Terdakwa buat, namun demikian Terdakwa menyerahkan surat keterangan tanah tersebut kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa surat keterangan tanah yang diterima dari terdakwa tersebut digunakan oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) sebagai bukti kepemilikan tanah miliknya dan rencananya akan digunakan sebagai syarat penerbitan sertifikat tanah, bahkan Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) telah memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuha dan menggugat Saksi Korban La Ode Haji Haru dengan nomor register 17/Pdt.G/2023/PN Lbh serta menggunakan surat keterangan tanah dari Terdakwa sebagai bukti;

Menimbang, bahwa disamping apa yang menjadi pertimbangan di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan petunjuk, dimana pada tanggal 30 Mei 2016, Saksi La Ode Baharudin dan Terdakwa melakukan pinjam meminjam, dimana Saksi La Ode Baharudin meminjam uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminan tanah yang sesuai dengan Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu alasan kenapa Terdakwa berani memberikan informasi yang tidak benar kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin agar Surat Keterangan Tanah tersebut bisa keluar dan tanah tersebut dapat dijadikan jaminan utang;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan kalau dia meminjamkan uang kepada Saksi La Ode Baharudin bukan pada tahun 2016 melainkan pada tahun 2013, namun hal tersebut Majelis Hakim ragukan kebenarannya dikarenakan keterangan Terdakwa tidak konsisten dan berbelit-belit, sehingga Majelis Hakim memeriksa Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi La Ode Haji Haru, Nassarudin Hi Ismail Alias Nas, La Asli alias Asli di tingkat penyidikan dan diketemukan sebuah foto kwitansi atas nama diri Terdakwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2016 dengan keterangan untuk pembayaran lahan



cengkeh 130 pohon beralamat di desa Soasangaji kecamatan Obi Barat Kabupaten Halmahera Selatan, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Saksi La Ode Baharudin sebagai penjual pemilik dan Terdakwa sebagai pembeli lahan cengkeh;

Menimbang, bahwa selain foto kwitansi, Majelis Hakim juga menemukan foto sebuah papan kayu pada berita acara pemeriksaan Saksi La Ode Haji Haru, Nassarudin Hi Ismail Alias Nas dan Saksi La Asli Alias La Asli yang bertuliskan "Tanah ini hak milik Laode Sudarmono sejak tanggal 30 Mei 2016 – Hubungi saya dan gugat saya" yang ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedua foto tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, di antara Saksi La Ode Baharudin dan Terdakwa terjadi sebuah transaksi dimana Saksi La Ode Baharudin mendapatkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016, sehingga Majelis Hakim yakin apabila transaksi di antara Saksi La Ode Baharudin dan Terdakwa terjadi pada tahun 2016 bukan pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa transaksi antara Saksi La Ode Baharudin dan Terdakwa juga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan Terdakwa membantu membuatkan Surat Keterangan Tanah nomor 593.3/02-2016 bukan hanya agar Saksi La Ode Baharudin dapat menjadi pemilik tanah tapi juga agar Saksi La Ode Baharudin dapat mengalihkan tanah tersebut kepada Terdakwa untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Terdakwa membantu Saksi La Ode Baharudin mengajukan permohonan surat keterangan tanah kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin, Terdakwa memang sudah bermaksud untuk menggunakan surat tersebut agar Saksi La Ode Baharudin dapat menguasai tanah dan kemudian menjual tanah tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan maksud memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu telah terpenuhi;

#### **Ad.5. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa maksud kata "dapat" dalam unsur ini adalah menunjukkan bahwa kerugian secara nyata tidak harus benar terjadi, tetapi baru kemungkinan saja akan adanya kerugian saja sudah cukup. Sedangkan yang dimaksud dengan "Kerugian" dalam pasal ini tidak hanya meliputi kerugian





materiil, akan tetapi juga yang bersifat imaterial seperti hilangnya kepercayaan masyarakat, kehormatan, timbulnya rasa ketakutan, hilangnya kesenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang dan Theo Lamintang “ bahwa kata-kata Menimbulkan kerugian di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dimaksudkan bahwa pembentuk Undang-undang tidak menyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, memungkinkan hanya adanya kerugian saja sudah cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian dalam pasal ini adalah bahwa kerugian tidak perlu benar-benar ada, tetapi baru kemungkinan saja akan ada kerugian, pelaku dapat dihukum atas dasar pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari Saksi Korban La Ode Haji Haru mengatakan bahwa telah mengalami kerugian dalam bentuk akomodasi lintas desa bahkan lintas pulau selama bertahun-tahun Saksi Korban La Ode Haji Haru memperjuangkan status kepemilikan tanah dan ditambah dengan hasil bumi baik emas dan cengkeh yang telah dinikmati oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah), sehingga merupakan suatu bentuk kerugian yang nyata secara materiil atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim berkesimpulan unsur yang dapat menimbulkan kerugian telah terbukti;

**Ad.6. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk hubungan dari Penyertaan adalah sangat penting, karena sebagaimana terlihat dalam uraian di atas, hubungan antara peserta-peserta itu satu sama lainnya tidak sama eratnya. Harus dibedakan hubungan antara seseorang yang menggerakkan (*uitlokker*) terhadap yang digerakkan (*uitgelokte*), hubungan antara seseorang dan orang lain yang bersama-sama (perbarengan) melakukan suatu tindak pidana, dengan seseorang yang dibantu orang lain melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya memformulasikan bahwa dua orang atau lebih yang telah melakukan perbuatan memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik merupakan unsur subjektif maupun unsur objektif dalam konteks pasal 55 ayat 1 KUHP dirumuskan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pembuatan surat keterangan tanah berawal pada bulan April tahun 2016 saat Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang berniat membuat dokumen surat keterangan tanah sengketa datang ke Kantor Desa Gandasuli namun karena tidak cukup syarat sehingga Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) pulang kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) yang sudah mengenal dekat Terdakwa yang merupakan saudara kandung Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) kemudian berkomunikasi dan meminta tolong untuk dibantu dalam penerbitan surat keterangan tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima permintaan dari Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan memfasilitasi untuk bertemu dengan Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah) kemudian atas arahan dari Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah), Terdakwa membantu Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) mempersiapkan syarat penerbitan surat keterangan berupa membuat surat permohonan, mengumpulkan berkas atau identitas pemohon, mengukur dan membuat sketsa tanah;

Menimbang, ketika semua syarat dan berkas surat keterangan tanah sudah jadi pada bulan Mei tahun 2016 kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) setelah itu langsung diketik dan cetak oleh Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin (terdakwa terpisah) sehingga dapat terbitnya Surat Keterangan Hak Kepemilikan Sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh milik Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) dan diserahkan kepada Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sempat terjadi pengalihan hak kepemilikan tanah sengketa kepada Terdakwa karena tanah tersebut pernah dijaminan oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) saat meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tahun 2016 dan baru dilunasi oleh Saksi La Ode Baharudin (terdakwa terpisah) pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa yang membantu Saksi La Ode Baharudin mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanah kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin dengan memberikan informasi yang salah, adalah termasuk dalam kategori turut serta melakukan



(medeplegen) dimana Terdakwa adalah orang yang turut serta membantu Saksi La Ode Baharudin dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) karena berhubungan dengan perbuatan administrasi pemerintahan serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berbeda dengan surat asli yang dikeluarkan oleh Terdakwa dan Saksi Wa Ode Yusna (terdakwa terpisah). Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan peradilan umum (pengadilan negeri) karena berhubungan dengan perbuatan administrasi pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum di atas unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti melakukan pemalsuan surat yang merupakan kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa bukti Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang menjadi dasar pemeriksaan perkara *a quo* berbeda dengan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang dimiliki oleh Penasihat Hukum, maka Majelis Hakim memiliki pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari awal pemeriksaan perkara *a quo* baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah



berulang kali ditunjukkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi penuntut umum dan tidak ada sekalipun Terdakwa menyatakan kalau surat keterangan tersebut adalah surat yang berbeda, baru ketika Penasihat Hukum menunjukkan Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi Penasihat Hukum barulah Terdakwa mengubah keterangan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu memastikan surat mana yang benar-benar dibuat dan justru membuat Majelis Hakim yakin kalau Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 adalah palsu;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 versi penuntut umum adalah bukti surat yang telah disita dari Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor SP-Sita/77.b/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 26 September 2022 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan nomor 109/Pen.Peny/2022/PN Lbh yang ditandatangani oleh PLH Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 28 September 2022, serta ketika penyitaan surat tersebut juga telah ada Berita Acara Penyitaan antara penyidik yang diwakili Wahyu Hermawan, S.H., Penyidik berpangkat IPDA dengan didampingi AIPDA M Jibu, S.H dan Briptu Risman La Rahu, S.H., sebagai penyidik pembantu dengan Wa Ode Yusna Kaimudin, Sp.d.SD dan berita acara penyitaan tersebut telah ditanda tangani oleh Wa Ode Yusna Kaimudin sendiri dan disaksikan oleh Hardin Lasongo, S.H., saksi dari pihak penyidik serta Darman Sugianto, S.H., M.H., saksi dari pihak Wa Ode Yusna Kaimudin dan berita acara penyitaan tersebut juga telah ditanda tangani oleh kedua saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim yakin jika surat yang disita oleh pihak penyidik dan menjadi dasar penyidikan perkara *a quo* adalah surat yang benar dan telah disita melalui proses yang benar sehingga layak untuk dijadikan alat bukti surat, sehingga Surat Keterangan Hak Kepemilikan sebidang Tanah Lahan Kebun Cengkeh nomor 593.3/02-2016 yang dilampirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya layak dikesampingkan dan terhadap pembelaan ini layak untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986,
- 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji,
- 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat,

dikembalikan kepada La Ode Haji Haru;

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016,

dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin;

- 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016,
- Tulisan/surat Sebidang tanah/lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

yang dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa berbelit-beli dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Sudarmono Alias Mono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat jual beli tanggal 08 Oktober 1986;
  - 2 (dua) lembar fotocopy berita acara keputusan nomor 235/DS-S/140/VI/2021 tanggal 10 April 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Soasangaji;
  - 2 (dua) lembar fotocopy surat keputusan penghentian nomor 152/K-OB/140/IX/2021 tanggal 08 September 2021 yang ditandatangani camat Obi Barat;dikembalikan kepada La Ode Haji Haru;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 97 tahun 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penunjukan Pejabat Kepala Desa di 10 Desa pada 7 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 08 April 2016; dikembalikan kepada Saksi Wa Ode Yusna Kaimudin;

- 2 (dua) lembar surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;
- Tulisan/surat Sebidang tanah / lahan sesuai surat keterangan hak kepemilikan sebidang tanah lahan kebun cengkeh dengan nomor 593.3/02-2016 tanggal 26 Mei 2016;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami, Tito Santano Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Manguluang, S.H., M.Kn., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hangga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Manguluang, S.H., M.Kn.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hangga, S.H.

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Lbh